

T
346.04 ✓
NUR
d.
1998.



**DAMPAK PENGGUNAAN HAK ULAYAT OLEH
PENGUSAHA TERHADAP WARGA
PERSEKUTUAN MATRILINEAL**
(Studi di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :
Zefrizal Nurdin, SH

Pembimbing
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1998

UPT-PUSTAK-UNDIP

**DAMPAK PENGGUNAAN HAK ULAYAT OLEH
PENGUSAHA TERHADAP WARGA PERSEKUTUAN
MATRILINEAL**

(Studi di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)

Disusun Oleh :

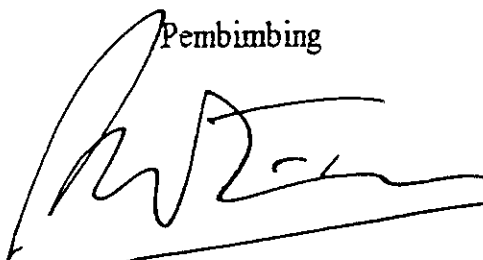
Zefrizal Nurdin, SH

Nim. B4A 096060

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal :**

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH



**Mengetahui Ketua Program Magister
Ilmu Hukum**



Prof. Purwahid Patrik, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang berkat rahmat dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk melengkapi persyaratan dalam program magister ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Salawat panjang untuk junjungan tercinta Rasulullah SAW, yang berhasil membuka mata umat atas harkat budaya kemanusiaan yang sejati. Salam untuknya.

Adu kepentingan antara warga matrilineal yang berfilosofi pertanahan dengan cenderung menjadikannya sebagai aset cadangan ekonomi bagi anak kemenakan, dengan kepentingan penguasa dan pengusaha perkebunan yang ingin segera melakukan efektivisasi memancing minat penulis untuk melakukan penelitian terhadapnya. Apalagi setelah melihat deru pembangunan lahan sawit yang berketerusan di tengah-tengah warga yang masih seperti terperangah. Hasilnya dituangkan dalam tesis ini.

Sungguh, penulisan tesis ini tak akan jadi, bila Yml Bapanda Satjipto Rahardjo tidak memberikan arahan-arahan yang memukau tanpa rasa lelah. Tanpa sifat pelit. Kapan pun. Dimanapun. Untuk beliau penulis sangat berterimakasih dan berdoa agar Allah berkenan memasukkannya kelak dalam surga Jannatunna'im. Amien.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih pula kepada semua pihak yang telah sangat berjasa terhadap penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Purwahid Patrik, SH (Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip).
2. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki, SH (Guru Besar pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip).
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH (Dekan Fakultas Hukum Undip)
4. Ibu Dr. Esni Warasih, SH .MH (Dosen Mata Kuliah MPH pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip).
5. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen di S-2 Ilmu Hukum Undip.

6. Kakanda Eko Soponyono, SH, MH, yang telah banyak membantu penulis dalam suka dan duka.
7. Tigo Tungku Sajaringan di lokasi penelitian yang telah banyak memberi informasinya.
8. Mandeh Saadah yang sangat tabah dan demokratis terhadap kami anak-anaknya, serta kakak-kakakku semua.
9. Fatmayarnis, Lenggeng Putra, Upi Puspita, Gema Putri (Istri dan Anak-anakku tersayang).
10. Sobat kentalku Rinaldi, Zamharis, dan Syahnel yang sering memberiku motivasi bila aku terasa jenuh.

Akhir kalam doa selamatku untuk semua dan mohon tegur spanya atas kekurangan-kekurangan yang ada.

Padang, September 1998
Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
 BAB II HAK ULAYAT DALAM MASYARAKAT PERSEKUTUAN MATRILINEAL DAN PERUBAHAN SOSIAL	 19
A. Adat nan diadakan sebagai Landasan Hak Ulayat	19
B. Kekuatan dan Jenis Hak Ulayat serta perbedaannya dengan Harta Pusaka Tinggi	 32
C. Makna Hak Ulayat bagi warga Persekutuan Matrilineal dan Larangan Peralihannya	 41
D. Hak Ulayat, Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Sosial	 51

BAB III	PENGUNAAN HAK ULAYAT OLEH PENGUSAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PASAMAN	67
A.	Hasil Penelitian	67
1.	Monografi Wilayah Penelitian	67
2.	Penggunaan Tanah Ulayat dan Alasan Masyarakat Setempat dalam Melepaskan Hak Ulayat Mereka	72
3.	Pola Pelepasan Tanah Ulayat	80
4.	Pengaruh Kebijakan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Matrilineal . . .	93
5.	Untung Rugi akibat Penggunaan Tanah Ulayat Oleh Pengusaha Terhadap Warga Persekutuan Setempat . . .	96
B.	Analisis	100
1.	Analisis Terhadap Alasan-alasan Peralihan Hak Ulayat	100
2.	Analisis Terhadap Pola Pelepasan Hak Ulayat	107
3.	Analisis Terhadap Pengaruh Kebijakan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Sosial	113
4.	Analisis Terhadap Untung Rugi Akibat Penggunaan Tanah Ulayat	124
BAB IV	PENUTUP	133
A.	Kesimpulan	133
B.	Saran-saran	136
C.	Kontribusi Teori	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	140

RINGKASAN

Satu diantara aset perekonomian yang dapat dibanggakan bangsa Indonesia adalah banyaknya lahan subur yang dapat dengan mudah dikembangkan untuk usaha perkebunan diantaranya sawit, seperti yang saat ini banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing maupun domestik di berbagai daerah, termasuk di ranah Pasaman, Sumatra Barat.

Sebagai wilayah yang selama ini terasa kental dengan sistem kekerabatan matrilinealnya yang unik dan sarat dengan filosofi hidup yang menyertainya, maka peralihan hak atas tanah dengan tanpa menghiraukan nilai-nilai adat matrilineal akan dapat jadi pemicu konflik berkepanjangan sehingga menggagalkan tujuan pembangunan.

Permasalahan yang diajukan lebih menyangkut kepada adu kepentingan antara pengusaha dan penguasa yang ingin mengoptimalkan pemberdayaan pertanahan dengan kepentingan warga persekutuan yang menjadikan tanah sebagai aset cadangan buat kehidupan anak kemenakan.

Dari jawaban permasalahan diharapkan antara lain ditemukan solusi-solusi terbaik dalam pengelolaan tanah-tanah ulayat sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Penelitian ini mencoba menguak dampak penggunaan tanah ulayat oleh pengusaha terhadap warga setempat dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial budaya. Dengan pendekatan sosiolegal research sudah barang tentu banyak digunakan teori-teori sosiologi hukum dalam menelaah segala fakta yang ditimbulkannya. Teknik sampling yang digunakan dalam bentuk purposif dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis yang dipakai adalah gabungan antara analisis domain, taksonomis, komponensial dan tema kultural. Untuk menguji keakuratan data dilakukan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian membuktikan adanya lima alasan yang menyebabkan warga mau melepas tanah ulayat mereka dengan pola pelepasan yang mengandung dualisme

hukum. Hukum, khususnya kebijakan-kebijakan penggunaan tanah ulayat tidak saja berperan sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga ternyata menjadi sarana social engineering kedalam warga persekutuan matrilineal. Ia menyentuk sisi yang paling unik pada sistem kekerabatan ini dengan perlahan-lahan menggeser pola hubungan mamak-kemenakan kepada pola hubungan orang tua-anak. Akibatnya segala aspek yang berkaitan dengannya menjadi ikut tergeser. Mamak tidak lagi jadi sandaran ekonomi andalan dan tidak pula diletakkan dalam lapisan sosial yang lebih terhormat. Kontrol kaum wanita terhadap kekuasaan mamak kian terlepas dan secara tidak langsung ikut mempermulus timbulnya kolusi antara pengusaha, penguasa dan mamak. Sementara anggota persekutuan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari penggunaan tanah ulayat dengan pola PIR ini. Lahan plasma belum pernah diserahkan ketangan warga sesuai dengan surat kesepakatan yang dari awal dibuat tidak memuat ketentuan-ketentuan rinci. Dalam interaksi sosial warga, surat kesepakatan ataupun uang silih jariah hanyalah sekedar simbol tanda terjalinnya hubungan kebersamaan dan saling kepercayaan, namun disitu tersirat jelas muatan kandungan kewajiban-kewajiban para pihak.

Banyak pengusaha memanfaatkan celah-celah kelemahan dan hubungan semi informal ini untuk tidak memulihkan hak-hak warga dan menipiskan makna kebersamaan. Penggunaan hukum dalam negara modern ternyata cenderung menggeser nilai-nilai luhur tradisional yang komunal toleran kearah nilai-nilai ekonomis individualistis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah merupakan kepentingan vital bagi manusia guna diolah untuk keperluan pertanian, tempat mendirikan bangunan dan sebagainya. Tak hanya dipakai untuk sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tanah bahkan kadang kala menunjukkan sosoknya sebagai penentu tingkat pelapisan sosial pemiliknya.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat terutama dinegara-negara berkembang dan bercorak agraris seperti Indonesia, sementara luas tanah tak pernah bertambah menjadikan nilai tanah semakin tinggi dan penting.

Sejarah telah membuktikan, masuknya pemerintahan kolonial ke Indonesia tak lain berawal dari perebutan tanah-tanah di Nusantara yang umumnya produktif, sehingga mampu mensuplai kebutuhan komoditi Eropa. Pada saat itu muncullah tuan-tuan tanah dari kalangan bangsa Eropa dengan mendesak hak-hak atas tanah Bumiputera.

Alur strategi kebijakan kolonial ialah bagaimana cara yang lebih efektif untuk memperoleh tanah (dan tenaga kerja) dalam jumlah yang diperlukan guna meneruskan upaya agar bumi Hindia Belanda, khususnya pulau Jawa,

dapat tetap menjadi daerah usaha agrikultural yang menguntungkan dan saldo plus (batig slot) dalam kas negeri Belanda tetap dapat dijamin.¹

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda adalah dengan mengeluarkan pernyataan domein (domein verklaring) negara terhadap tanah-tanah yang tak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh bangsa Bumiputera, dan hal ini berakibat terjadinya pergeseran kepemilikan hak atas tanah, terutama terhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang kala itu banyak belum digarap dan sulit dibuktikan kepemilikannya.

Secara lahiriah, terdapat sedikit tujuan positif dari dikeluarkannya pernyataan domein negara oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni menyangkut pemberian kepastian hak atas tanah bagi golongan Bumiputera. Tetapi hakikat yang sesungguhnya dari pernyataan domein tersebut tak lain untuk memberikan dasar legitimasi kepada negara dalam memperoleh tanah-tanah yang dianggap subur bagi kepentingan perkebunan untuk selanjutnya diserahkan kepada pengusaha Belanda baik perorangan maupun berupa badan hukum. Disamping itu pernyataan domein mengandung makna pula agar tidak terjadi peralihan hak atas tanah dari golongan Bumiputera kepada bangsa asing selain Belanda.

1. Sostandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 90.

Akibatnya nyata dari pernyataan domein oleh pemerintah kolonial tersebut seperti telah sedikit disinggung diatas, banyak tanah-tanah yang semula dikuasai orang-orang Bumiputera menjadi beralih dan jatuh ketangan pemerintah kolonial untuk selanjutnya digarap dan dijadikan sebagai lahan perkebunan yang ditanami kopi, cengkeh, kulit manis dan tanaman jenis lain yang sangat dibutuhkan dan laku di pasaran Eropa kala itu

Dapat dipahami bila pernyataan domein itu berakibat banyaknya golongan Bumiputera yang kehilangan hak atas tanah mereka, mengingat sulitnya bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka adalah sebagai pemilik dari tanah-tanah yang mereka kuasai, lantaran tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah, bahkan nyaris pada umumnya masih buta huruf apalagi untuk tidak buta hukum dan belum lazim menggunakan pembuktian tertulis. Akibatnya terhadap tanah-tanah yang dianggap subur dan diincar oleh pemerintah kolonial Belanda begitu mudah terjadi pergeseran hak-hak atas tanah. Terhadap tanah-tanah yang telah digarap Bumiputera sekalipun, apalagi terhadap tanah milik persekutuan yang belum pernah digarap seperti hak ulayat dengan mudah jatuh kedalam kekuasaan kolonial.

Pemilik tanah dari golongan Bumiputera yang tidak dapat memberikan pembuktian bahwa tanah yang sekalipun telah digarapnya itu adalah eigendommenya, maka dianggap sebagai milik pemerintah. Memang pembuktian tertulis tidak merupakan syarat mutlak, tetapi melalui pembuktian tidak

tertulis seperti pengakuan lisan dan penuturan saksi tidaklah selalu menjamin bahwa tanah garapan tersebut secara otomatis akan diakui sebagai eigendom yang bersangkutan. Apalagi kalau sejak semula tanah tersebut telah direncanakan untuk dipatok harus berada dalam genggamannya pemerintah kolonial, maka segala rekayasa hukum untuk mendapatkannya akan mudah dibuat dan diperankan, sebab dipihak lain hanya akan berhadapan dengan kekuatan yang amat lemah dari golongan Bumiputera yang masih dianggap dungu.

Terhadap hak ulayat yang pada umumnya saat itu masih terbengkalai, atau dibiarkan tak tergarap karena memang direncanakan untuk aset perekonomian bagi keturunan selanjutnya dari anggota persekutuan yang lambat laun pasti akan berkembang dan membutuhkan lahan untuk pertanian serta pembukaan kampung baru, jauh lebih mudah untuk diklaim sebagai eigendom negara bagi pemerintah Belanda.

Ketika kemerdekaan Indonesia telah berumur lima belas tahun, ternyata keberadaan dan status hak ulayat itu kembali mendapat pengakuan pemerintah. Melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dinyatakan bahwa hak ulayat tersebut diakui keberadaannya sepanjang hak ulayat tersebut masih ada. Ini mengandung makna jika disuatu daerah tertentu hak ulayat sudah tak dijumpai lagi atau sudah habis dan jatuh menjadi milik perseorangan lantaran berbagai sebab seperti pembukaan lahan pertanian yang terus menerus dari

warga persekutuan sehingga terjalin hubungan yang kuat antara subyek dan obyek (tanah) dan sekaligus memperlemah hubungan tanah dengan persekutuan semula, maka tak perlu dihidupkan lagi keberadaan tanah ulayat yang sudah kehilangan identitasnya tersebut.

Pada setiap daerah yang menurut hukum adat setempat mengenal keberadaan hak ulayat, tidaklah selalu mempunyai karakteristik yang sama. Karakteristik hak ulayat yang dikenal dalam kekerabatan patrilineal ataupun parental, akan berbeda dengan yang terdapat pada sistem kekerabatan matrilineal.

Seperti lazimnya hukum adat yang bersifat komunal, dalam sistem hukum adat matrilineal Minangkabau, nilai kebersamaan dan solidaritas sosial terasa lebih kental mencuat kepermukaan. Tanggung jawab dari anggota persekutuan atau setiap rumah tangga yang ada dalam persekutuan matrilineal tidak hanya sebatas terhadap anggota inti dalam keluarga batih saja, seperti seorang bapak yang mesti bertanggung jawab secara layak memenuhi kebutuhan anak-anak dan istrinya, tetapi ia punya tanggung jawab yang lebih luas lagi terhadap kemenakan-kemenakannya dan terhadap orang-orang yang sesuku dengannya. Lebih jauh lagi terhadap anggota persekutuan yang lebih besar. Dengan demikian tidak mengherankan bila di Minangkabau terdapat pola hubungan "mamak-kemenakan" yang tidak dijumpai di daerah lain di luar kekerabatan matrilineal.

Sifat komunal yang melahirkan solidaritas sosial yang sangat tinggi itu membias pula terhadap pemanfaatan hak ulayat yang sebenarnya dijadikan sebagai simpanan atau persediaan bagi anak/kemenakan dibelakang hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Ajaran hukum adat Minangkabau lebih cenderung untuk membiarkan tanah ulayat itu tak tergarap sementara belum mampu untuk itu, dari pada memeralihkan hak tersebut kepada orang luar persekutuan. Adanya larangan memeralihkan hak ulayat tersebut merupakan bukti yang kuat terhadap kesimpulan diatas.

Sebelum masuknya modal asing ke Indonesia, khususnya para pemodal yang bergerak menanamkan investasinya dibidang perkebunan sawit, ternyata banyak tanah-tanah hak ulayat yang dibiarkan merimba tak tergarap, lebih-lebih terhadap hak ulayat nagari dan ulayat suku.

Ada suatu fenomena lain yang menyebabkan tanah-tanah ulayat itu tidak banyak dimanfaatkan oleh anggota persekutuan yakni karakteristik orang Minangkabau yang memiliki jiwa perantau. Umumnya pola rantau yang dilakukan adalah rantau kota dan berharap ditempat tujuan bisa menjadi pedagang. Karakter suku Minangkabau yang suka menjadi pedagang bahkan diandalkan menjadi pesaing bagi pedagang non pribumi didalam negeri.

Seperti halnya kelaziman yang terjadi dalam fenomena migrasi, kaum laki-lakilah yang lebih banyak dari suku Minangkabau pergi merantau.

Fenomena ini juga menjadi salah satu unsur penyebab tak tergarapnya hak ulayat.

Tampaknya keterbengkalaihan hak ulayat bagi warga persekutuan bukanlah suatu hal yang perlu dirisaukan. Anak/kemenakan yang berangkat merantau dan tidak ada jaminan untuk sukses dinegeri orang, bila kembali karena gagal tetap dapat menemui landasan tempat berpijak diatas tanah ulayat untuk kembali hidup sebagai petani. Paling tidak tanah ulayat diharap dapat memenuhi kebutuhan minimum ekonomi keluarganya.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakatpun terus berubah. Perubahan sosial tidak hanya ditentukan oleh unsur-unsur internal yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan tetapi justru lebih banyak ditentukan oleh kekuatan faktor-faktor eksternal yang berada diluar kontrol anggota persekutuan.

Derap pembangunan yang begitu kuat dan nyaring, jelas lebih menekankan efektifitas pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, baik melalui kekuatan sendiri maupun dengan mengundang modal asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia, sudah barang tentu akan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia dan memungkinkan untuk itu, satu diantaranya adalah sumber daya alam berupa tanah ulayat guna pengembangan perekebunan maupun kepentingan industrial, seperti industri untuk

pengolahan minyak sawit yang lazimnya dibangun dekat lahan perkebunan yang ada.

Sebelum masuknya modal asing ke Indonesia atau katakanlah ketika teknologi pertanian bangsa-bangsa dunia belum secanggih sekarang dan hasil produksi dari perkebunan sawit seperti minyak goreng dan pelumas/olie belum mendapatkan porsi yang strategis serupa kini dipasaran dunia, lahan pertanian seperti hak ulayat belum menjadi bidikan utama para pengusaha. Akibatnya hak ulayat tetap terbiarkan apa adanya, tanpa terusik oleh kepentingan berbagai pihak. Hak ulayat hanya terpergunakan baru sebagian kecil saja oleh anggota persekutuan untuk sekadar pemenuhan kebutuhan pokok, sekalipun peningkatan ekonomi berjalan lambat.

Ketika hasil-hasil perekebunan terutama sawit mendapatkan tempatnya yang sangat menguntungkan dipasar dunia yang semakin terbuka, maka semua tanah yang cocok untuk dijadikan lahan perekebunan sawit menjadi titik sentral perhatian para investor dan pemerintah. Tak jarang terjadi munculnya persaingan diantara mereka untuk mendapatkan lahan-lahan yang dianggap subur.

Dalam era globalisasi, setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomian negaranya, termasuk Indonesia. Lokomotif penggerak ekonomi itu lebih disandarkan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

Pemerintah menyadari bahwa tanpa andil dari pengusaha-pengusaha yang mempunyai modal serta keterbatasan dana dari pemerintah sendiri, maka mustahil perekonomian negara meningkat dengan cepat. Oleh sebab itu pemerintah cenderung membukakan kran dengan memberikan fasilitas-fasilitas antara lain berupa kemudahan perizinan bagi badan-badan usaha swasta untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Memang akhir-akhir ini, pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin baru untuk modal asing yang punya minat berbisnis dengan menanamkan investasinya di bidang perkebunan sawit, tetapi tidak untuk badan-badan usaha swasta dalam negeri. Tidak terdapatnya lagi persaingan dari modal asing yang baru, kecuali dari pemodal-pemodal asing yang telah mendapatkan izin sebelumnya, justru diperkirakan menaikkan minat badan usaha swasta dalam negeri untuk berkiprah pada lahan yang belum tergarap dan cocok untuk tanaman jenis ini.

Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat adalah salah satu wilayah potensial dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dengan iklim tropis yang pas untuk tanaman jenis ini serta lahannya yang luas tanpa perbukitan, tak pelak menjadikan daerah ini sebagai primadona untuk ajang berinvestasi.

Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian bangsa, melihat hak ulayat sebagai sumber ekonomi yang rancak. Berdasarkan hak menguasai negara, ternyata pemerintah banyak berhasil memperoleh hak ulayat di Kabupaten Pasaman yang kemudian

dikembangkan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan tak sedikit diantaranya diberikan kepada pemodal asing untuk digunakan usaha serupa. Diantaranya dimiliki oleh PT. Agam Masang Perkasa (PT. AMP) yang investornya berkebangsaan Singapura dengan luas lahan puluhan ribu hektar.

Pemanfaatan maupun tekanan terhadap hak ulayat, lebih-lebih menjelang era globalisasi ini, akan tetap menjadi issue krusial, apalagi bila dalam pemanfaatan hak tersebut masyarakat setempat hanya berdiri sebagai penonton tanpa memperoleh tetesan dari banjir keuntungan yang didapat para pengusaha.

Oleh sebab itu perlu dipahami mengenai hak ulayat ini dalam konteks sosiologi hukum masyarakat yang bersangkutan agar penggunaan hak ulayat tidak mengundang bom waktu yang memunculkan sengketa dikemudian hari.

B. Permasalahan

Pembangunan menghendaki efektifitas pemanfaatan segala faktor sumber daya, termasuk sumber daya alam berupa tanah ulayat entah untuk kepentingan pembukaan perkebunan seperti diuraikan dimuka, ataupun untuk kepentingan industrialisasi. Pembangunan harus berjalan cepat ataupun lambat, tetapi tidak menunggu seperti layaknya tanah ulayat menunggu perantau gagal yang pulang kampung.

Dalam kondisi seperti ini dapat saja terjadi benturan nilai-nilai tradisional dengan pandangan negara modern yang lebih menekankan efektifitas namun cenderung bersifat individual.

Nilai-nilai tradisional dapat saja menuding bahwa efektifitas yang didengung-dengungkan dan diagungkan itu lebih berwatak pengurusan secara tamak terhadap sumber daya alam yang telah dianugerahkan Tuhan, karena bagaimanapun sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan bila dieksploitir secara terus menerus. Apalagi bila dalam pemanfaatan sumber daya alam itu dengan tidak mengindahkan sama sekali nilai-nilai tradisional yang dianut warga setempat.

Sebaliknya bagi para pengusaha maupun pihak pemerintah, pandangan tradisional warga terhadap hak ulayat dapat dianggap sebagai faktor penghambat dalam mengembangkan peningkatan perekonomian bangsa. Membiarkan hak ulayat terlantar tanpa dimanfaatkan dan hanya dipersiapkan sebagai tanah cadangan bagi keperluan anak dan kemenakan dibelakang hari adalah suatu perilaku mubazir dan suatu kesia-siaan. Oleh karenanya diperlukan perubahan-perubahan, antara lain melalui kebijakan-kebijakan hukum yang dapat membawa dampak tidak kecil terhadap perilaku sosial warga persekutuan.

Sejalan dengan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Nilai-nilai tradisional Minangkabau sangat tidak menghendaki terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat kepada pihak lain, termasuk kepada pengusahaan perkebunan seperti yang kini mulai banyak terjadi di Kabupaten Pasaman, sedangkan untuk kepentingan peningkatan pembangunan ekonomi bangsa dalam situasi pasar global yang kian kompetitif, pemberdayaan segala aset ekonomi strategis termasuk pemanfaatan tanah secara efisien, perubahan-perubahan dan langkah-langkah antisipatif lainnya mutlak diperlukan.

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa warga persekutuan matrilineal mulai bersedia melepaskan tanah ulayat mereka kepada pengusaha ?
2. Bagaimana pola pelepasan tanah ulayat tersebut ?
3. Sejauh mana kebijakan tentang penggunaan tanah ulayat oleh orang luar/pengusaha dapat menjadi instrumen perubahan sosial bagi masyarakat matrilineal ?
4. Apa untung ruginya bagi warga persekutuan setempat atas penggunaan tanah ulayat mereka oleh pengusaha ?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan-alasan penyebab warga persekutuan matrilineal melepaskan tanah ulayat mereka kepada pengusaha.
2. Mengetahui pola pelepasan tanah ulayat tersebut.
3. Mengetahui peranan hukum (khususnya kebijakan penggunaan tanah ulayat) selaku instrumen perubahan sosial terhadap masyarakat matrilineal
4. Mengetahui keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh masyarakat matrilineal akibat penggunaan tanah ulayat mereka oleh pengusaha, baik secara ekonomi, maupun sosial budaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Alasan-alasan serta pola pelepasan hak ulayat dari warga persekutuan matrilineal yang terungkap dari hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi pengusaha perkebunan yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman.
2. Hasil penelitian dapat memperjelas peranan mamak, para kepala suku (datuk dan penghulu) serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga informal dalam pengurusan hak ulayat.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk dilakukan pembenahan terhadap hak ulayat oleh pihak terkait, juga terhadap perubahan sosial

yang ditimbulkannya . Disamping itu bermanfaat pula dalam mengambil langkah-langkah yang lebih positif untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan bagi warga setempat dan menekan dampak negatifnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal research dan sifat penelitian adalah deskriptif. Dalam menggambarkan obyek penelitian lebih mementingkan perspektif emic.

2. Penentuan Sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam bentuk purposif. Selanjutnya penentuan responden dengan menggunakan "snowball sampling" (sampling bola salju). Jumlahnya belum dapat dipastikan sejak semula karena tergantung pada perkembangan data dilapangan sampai dirasa tuntas.

3. Jenis dan Sumber data.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif terutama dalam bentuk data primer dengan tidak mengenyampingkan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari responden dilokasi penelitian yang menurut rencana dilakukan pada dua Kanagarian, yakni Kinali dan Simpang Empat Pasaman, sedangkan sumber data sekunder berasal dari

dokumen-dokumen, makalah, tambo-tambo dan sejenisnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Pada awal penelitian wawancara dilakukan tidak berstruktur, namun bila dirasa cukup wawancara selanjutnya akan dilakukan dengan berstruktur. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen.

5. Alat Pengumpul data.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah :

- a. Peneliti sendiri sebagai instrumen kunci.
- b. Buku catatan.
- c. Alat perekam (jika dimungkinkan dan diperkirakan tidak mengandung kekhawatiran responden).

6. Teknik Analisis data.

Semua data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan secara logis, sistimatis dan konsisten. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial serta analisis tema kultural.

- a. Analisis domain, dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang apa yang terdapat dalam pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya masih merupakan pengetahuan/pengertian ditingkat permukaan tentang domain atau kategori konseptual (simbolis) misalnya domain persepsi, domain ruang/tempat, domain rasional/alasan lain-lain.
- b. Domain taksonomis, dilakukan guna mengetahui domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran semula penelitian. Dalam analisis ini dilakukan secara rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain dengan cara mengorganisasikan atau menghimpun elemen yang berkesamaan disuatu domain.
- c. Analisis Komponensial, dilakukan guna mengetahui perbedaan atau kontras antar elemen dalam suatu domain, jadi disini tidak lagi menunjukkan struktur internal masing-masing domain dengan menghimpun elemen-elemen yang memiliki kesamaan disuatu domain, seperti domain taksonomis diatas.
- d. Analisis tema kultural, dilakukan guna mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada dengan gagasan yang bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan itu lebih dari sekadar jumlah bagian, situasi sosial dan budaya apapun yang diteliti, dalam

kenyataannya bukanlah sekadar jumlah dari pecahan-pecahan aktifitas, pelaku, tempat dan fasilitas yang ada dalam situasi tersebut, melainkan suatu kesatuan yang terpola dalam suatu keseluruhan (complex pattern) sehingga terdapat tema-tema yang dijadikan orientasi kognitif oleh para pelakunya.²

7. Teknik Pengecekan Validitas Data.

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data, yakni data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya.

Denzin,³ membedakan empat macam triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini yang digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda.⁴ Hal ini ditempuh dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

2. Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Yayasan Asah Asih Asuh, hal. 91 – 107.

3. Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 178.

4. *Ibid*, hal.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

BAB II HAK ULAYAT DALAM MASYARAKAT PERSEKUTUAN MATRILINEAL DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Adat nan diadatkan Sebagai Landasan Hak Ulayat

Minangkabau yang sering kali diindentikan dengan Sumatera Barat (sekali pun sebenarnya penyamaan tersebut kurang tepat) dikenal dengan sistem kekerabatan yang unik ; *matrilineal* (garis keturunan dihitung menurut keturunan ibu). Bila menilik lebih jauh kedalam keunikan itu tidak hanya ada pada sistem kekerabatan demikian belaka, namun mengimbas pada setiap aspek kehidupan lainnya. Sistem matrilineal ternyata membawa konsekuensi terhadap pola kelakuan pada seluruh lembaga sosial yang ada, baik itu pranata sosial di bidang hukum, ekonomi, kesenian keagamaan dan sebagainya.

Penataan berbagai segi kehidupan berpegang kepada 4 (empat) macam adat, yaitu :

1. *Adat nan sabana adat*
2. *Adat nan diadatkan*
3. *Adat nan teradat*
4. *Adat istiadat*

Dari keempat macam adat diatas, diantaranya ada yang "*ndak lakang dek panah, ndak lapuak dek hujan*" (tidak lekang terkena panas dan tidak lapuk terkena hujan). Ungkapan tersebut menyiratkan akan kekukuhan dan

keampuhan adat yang bersangkutan, sehingga terdapat keharusan mutlak untuk mentaatinya.

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah.⁵

Kedalam adat nan sabana adat ini juga dimasukan segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam Al-Quran serta menurut nan sepanjang syarak tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut dengan adat yang datang dari Allah Ta'ala.⁶

Adat nan sabana adat ini pada hakekatnya tak lain dari ayat-ayat Allah, baik itu berupa ayat Allah yang tersurat maupun tersirat. Ayat Allah yang tersurat adalah ayat-ayat Allah yang diabadikan dalam Al-Quranul karim maupun dalam hadist-hadist Rasul. Sedangkan ayat Allah yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang Dia tebarkan didalam alam semesta termasuk diantaranya adalah sunnatullah atau ketentuan-ketentuan/hukum alam yang meliputi jagad raya. Diangkatnya adat nan sabana adat ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, tampak dari ungkapan adat yang

5. Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta 1997, hal. 56.

6. *Ibid*, hal. 57.

menyatakan : "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai*"⁷.

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah "*Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*"⁸.

Adat nan diadatkan oleh nenek moyang tersebut disusun begitu rupa dengan mengambil contoh dan perbandingan dari ketentuan-ketentuan alam takambang (alam terkembang).⁹

Adat nan teradat ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu ninik mamak ditiap-tiap nagari Minangkabau. Peraturan-peraturan tersebut berguna untuk melaksanakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek

7. Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu menambah ungkapan diatas dengan kalimat : *Camin nan indak kabua, palito nan indak padam* (Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, rangkaian mustika adat basandi syarak di Minangkabu, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hal.30).

Semua ungkapan adat diatas menyatakan bahwa hukum adat Minangkabau itu bersendikan kepada syarak (syariat islam), yakni syariat yang bersendikan kepada kitab Allah. Semua yang dikatakan oleh syariat haruslah terpakai kedalam adat. Dengan demikian landasan tersebut menjadi ibarat cermin yang tak pernah bisa kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan pernah padam. Ia selalu bisa dijadikan cermin dan untuk selamanya dapat menjadi suluh penerang.

8. Chairul Anwar, *Op cit*, hal. 57.

9. Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Op cit*, hal. 105

moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut karena hukum dasar dan pokok hanya disebutkan garis besar saja yang dengan sendiri harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari yang bersangkutan.

Berdasarkan yang demikian maka aturan adat nan teradat ini tidak sama coraknya disetiap nagari Minangkabau, dan inilah yang dimaksud oleh pepatah yang berbunyi : *"lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo"*. Artinya, aturan pelaksanaan disetiap nagari akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakannya.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan *adat istiadat* ialah juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu dinagari-nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut. Pendeknya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan.¹¹

Adat nan sabana adat dan adatnan diadatkan dalam sebutan sehari-hari disebut "*adat*", sedangkan adat nan teradat dan adat istiadat dalam sebutan

10. *Ibid*, hal. 110.

11. *Ibid*, hal. 112.

sehari-hari disebut "*istiadat*". Keempat jenis adat tersebut, yakni adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat serta adat nan teradat dan adat istiadat, dihimpun sebutannya dalam satu kata majemuk, yaitu "*adat istiadat Minangkabau*". Keempat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakatnya, dan ditemui juga ungkapan "*baadat Minangkabau*".

Yang sangat penting untuk dikatakan ialah bahwa keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. *Adat nan babuhua mari*, yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat sekalipun, yaitu :

- a. Adat nan sabana adat.
- b. Adat nan diadatkan.

Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia.

2. *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh diubah dengan melalui musyawarah, yaitu :

- a. Adat nan teradat.
- b. Adat istiadat.

Kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau.¹²

Uraian diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada ketentuan-ketentuan dari adat yang tak dapat ditawar-tawar, ketentuan mana diharuskan terwujud dalam perilaku sosial masyarakat matrilineal. Artinya ada pola perilaku sosial yang tak dapat disimpangi. Diantara ketentuan-ketentuan adat yang tak dapat disimpangi dan semestinya hidup dalam perilaku sosial masyarakat matrilineal adalah seperti yang terkandung dalam adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan.

Berbeda dengan pendapat Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu yang hanya memberikan kesempatan perubahan pada adat nan babuhua sentak, Dr. Chairul Anwar justru memberikan kesempatan dan peluang untuk terjadinya perubahan adat dari adat nan babuhua mati, khususnya terhadap adat nan diadatkan. Sifat keabadian (babuhua mati) dari adat nan diadatkan hanya ada dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.¹³

Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh dua bersaudara dan dipercayai sebagai nenek moyang orang

12. *Ibid*, hal. 113 – 114.

13. Chairul Anwar, *Op cit*, hal. 57.

Minangkabau, yaitu Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, adat mana merupakan hasil inspirasi dari belajar kepada alam jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang kemudian dituangkan kedalam bentuk pepatah, petiti, mamang, bidal, patun dan sebagainya.

Dengan demikian sebetulnya dasar adat Minangkabau itu tidak nyata kelihatan, tersembunyi dalam rangkaian pepatah, petiti, gurindam, mamang, bidal, yang membutuhkan rasa dan perasaan serta fikiran, karena umumnya peraturan-peraturan didalam adat diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.¹⁴

Sudah barang tentu yang dimaksud Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu tentang dasar adat yang tidak nyata kelihatan ini lebih ditujukan kepada adat nan diadatkan, karena memang itulah yang dituangkan kedalam karya budaya manusia berbentuk gurindam, pantun dan sejenisnya, namun hal ini bukanlah lantas dapat diartikan bahwa tidak diperlukan kekuatan rasa dan fikiran dalam menangkap makna dari ketentuan adat nan sabana adat.

Kemudian setelah Islam masuk ke Minangkabau, adat yang semula bersumber dari alam berkembang jadi guru, seperti mendapat wadah baru lantaran ajaran Islam yang mengandung banyak perintah untuk berguru kepada alam. Menjadi sempurna adat Minangkabau oleh ajaran Islam, dan pada perjalanan waktu berikutnya, ajaran Islam itu ditarik ketangga pertama

14. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op cit*, hal. 17.

landasan adat, sedangkan adat nan diaadatkan digeser untuk cukup berada pada peringkat sesudahnya.

Dari keempat macam adat itu, *adat nan diadatkan* merupakan aturan-aturan yang secara langsung paling banyak berkaitan dengan susunan masyarakat matrilineal dan berlaku untuk seluruh nagarian yang berada dalam ranah Minangkabau. Adat nan diadatkan tersebut meliputi :

1. *Cupak nan duo*, terdiri dari :
 - a. *Cupak usali*.
 - b. *Cupak buatan*.
2. *Kato nan ampek*, terdiri dari
 - a. *Kato pusako*.
 - b. *Kato mupakat*.
 - c. *Kato dahulu*.
 - d. *Kato kudian*.
3. *Undang-undang nan ampek*, terdiri dari :
 - a. *Undang-undang luhak/rantau*.
 - b. *Undang-undang nagari*.
 - c. *Undang-undang didalam nagari*.
 - d. *Undang-undang nan duo puluhah*.
4. *Nagari nan ampek*, terdiri dari :
 - a. *Taratak*.

b. *Dusun*.

c. *Koto*.

d. *Nagari*.

Cupak dalam arti sebenarnya ialah seruas bambu dipakai orang Minangkabau untuk menentukan suatu isi takaran, dan ukuran ruas bambu secara alami (menurut asal atau usalnya) tidaklah seragam. Dengan demikian *cupak usali* itu mengandung makna simbolis dari penjelmaan alam yang tercipta dalam takaran tidak seragam.

Hal ini menurut Chairul Anwar mengkiaskan bahwa jika segala sesuatu penjelmaan alam ini dipakai oleh tiap tiap orang dipakai sebagai alat ukur untuk kepentingan dirinya, maka tak akan dijumpai kesatuan pendapat karena masing-masingnya bertolak dari ukuran yang berbeda, sehingga bila hanya "cupak usali" saja yang digunakan akan menuju kearah kekuasaan anarki.¹⁵ Sebab itu diperlukan cupak buatan.

Cupak buatan menyimbolkan akan keharusan adanya ukuran/makna seragam yang dapat digunakan masyarakat dalam berinteraksi. Dengan demikian akan terdapat kesatuan ukuran, persepsi yang sama. Jadi cupak buatan ini menyiratkan akan aturan-aturan yang dibuat dan punya kepastian hukum dalam ranah Minangkabau.

15. Lihat Chairul Anwar, *Ibid*, hal. 61.

Kato pusako merupakan kata-kata mutiara yang berasal dari kedua tokoh pendiri adat Minangkabau yang kemudian dijadikan acuan dalam setiap gerak kehidupan.

Contoh 1. *Malantiang manuju tangkai.*

Tantang bana buah karareh

(melantingkan/melempar (harus persis) menuju (ke) tangkai
(buah).

(setentang (tepat) benar buah akan jatuh)

Contoh 2. *Alang tukang binaso kayu.*

Alang alim rusak agamo

(kepalang/serba tanggung) tukang binasa kayu).

(kepalang alim rusak agama).

Kato mufakat ialah putusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, sesuai dengan alur dan patut. Aturan yang merupakan kata mufakat ini menurut Chairul Anwar bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan dinamika hidup bersama, sehingga perlu ada aturan-aturan baru mengatur hal-hal yang baru timbul kemudian, karena hal itu belum timbul diwaktu "*ninik nan baduo*" selaku pendiri adat Minang membuat kata pusako.¹⁶

16. Lihat Chairul Anwar, *Ibid*, hal. 64.

Kato dahulu ditepati, demikian ungkapan adat maksudnya kebiasaan yang lalu sejauh itu membawa kemaslahatan umum haruslah tetap sebagai demikian, termasuk menepati/merealisasikan putusan mufakat. *Kato kudian* (kata kemudian) merupakan "*kato bacari*", maksudnya kebiasaan-kebiasaan dahulu karena banyak juga yang kurang baik maka dicarilah penggantinya yang dapat menimbulkan kebajikan pada isi nagari.

Undang-undang nan ampek meliputi ; undang-undang Luhak/rantau, undang-undang nagari, undang-undang didalam nagari dan undang-undang nan duo puluh. Undang-undang Luhak/rantau dituangkan didalam ungkapan adat "*Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo*" (luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja). Ranah Minangkabau yang mencakup daerah asal disebut Darek (darat) dan dibagi dalam tiga luhak (Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar), masing-masing dikepalai penghulu, dan daerah rantau yang menjangkau sepanjang pesisir selatan dan barat, sampai ke pesisir timur Sumatera seperti Rokan, Siak, Kampar dan sebagian Jambi, dikepalai seorang raja. Segala ketentuan yang dibuat penghulu dan raja tidak boleh bertentangan dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun persekutuan matrilineal.

Undang-undang nagari merupakan aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap nagari, antara lain, harus : *balabuah* (berlebuah/jalan raya), *batapian* (bertepian/tempat mandi) *babalai*

(berbalai/berpasar), *bapandam pakuburan* (berpendam perkuburan),
bamusajik (bermesjid).

Undang-undang dalam nagari adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur masyarakat setiap nagari, dalam berbagai aspek kehidupannya.

Misal : *Salah cotok malantiangkan.*

Salah ambiak mangumbali.

Kaba baik baimbauan.

Kaba buruak baambauan

(salah cotok memperlantingkan).

(salah ambil mengembalikan).

(kabar baik dihimbaukan).

(kabar buruk berhamburan).

Undang-undang nan duo puluh adalah merupakan ketentuan pidana adat yang terdiri dari dua puluh ungkapan simbolis. Diantaranya :

Tasindorong jajak manurun.

Tatukiak jajak mandaki.

Alah bauriah bak sipasin .

(terdorong, (merupakan bukti) jejak (orang) menurun).

(tertukik, (merupakan bukti) jejak (orang) mendaki).

(telah bergores seperti sipasin (sejenis udang)).

Nagari nan ampek yang terdiri dari taratak, dusun, koto, dan nagari pada hakikatnya semua merupakan proses terbentuknya nagari yang bermula dari koto, meningkat menjadi taratak, dusun dan akhirnya menjadi nagari. Ukuran dari setiap proses yang dilalui termaktub dalam adat nan diadatkan.

Salah satu pengaturan yang khas dalam adat nan diadatkan adalah menyangkut bidang pertanahan, yang dimiliki bersama-sama oleh kelompok kekerabatan matrilineal, baik dalam jumlah besar ataupun kecil disebut *hak ulayat*.

Kato pusako yang merupakan wujud dari cupak buatan untuk dijadikan undang-undang nagari, melukiskan hak ulayat dengan :

Sakalian nego hutan tanah,

baikpun jirek nan sebatang,

baikpun rumput nan sehelai,

baikpun kasiak nan saincek,

kabawah sampai takasiak bulan

kaateh nyato taambun jantan,

pangkek pangulu punyo ulayat.

(Sekalian yang tumbuh di hutan tanah,

baikpun jirek nan sebatang,

baikpun rumput nan sehelai,

baik pun pasir nan sebutir,

kebawah sampai kepasir bulan (perut bumi),
keatas nyata (sampai) keembun jantan (embun lapisan atas),
pangkat penghulu punya ulayat).

Tajamnya ungkapan adat nan diadatkan sebagai landasan hak ulayat ikut mewarnai penentuan posisi serta strategi penggunaan hak ulayat menurut adat, terutama untuk menjaga keseimbangan ekonomi untuk anak kemenakan dibelakang hari.

B. Kekuatan dan Jenis Hak Ulayat serta Perbedaannya dengan Harta Pusaka Tinggi

Boedi Harsono menyatakan, hak ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak didalam lingkungan wilayahnya. Sebagaimana kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak kepunyaan bersama atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang

maupun yang belum. Masyarakat hukum adalah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku keluar dan kedalam. Kedalam berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "*orang asing*" atau "*orang luar*".¹⁷

Kekuatan keluar dari hak ulayat menurut Ter Haar Bzn meliputi :

1. Anggota suku bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil manfaat dari tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala suku/masyarakat hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (*uang pemasukan*, Aceh : *mesi*, Jawa) lebih dulu. Izin yang diberikan kepada suku bangsa lain bersifat sementara, misalnya untuk selama satu musim panen. Dalam prinsip anggota lain suku tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah-tanah tersebut.
2. Suku bangsa/masyarakat hukum yang mempunyai hak ulayat atas wilayahnya, bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam wilayahnya itu. Misalnya apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal atau dibunuh didalam wilayah tersebut, maka suku/masyarakat

17. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jambatan, Jakarta, 1994, hal. 162.

hukum wilayah yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mencari sipembunuh atau membayar denda.

Sedangkan kekuatan berlaku kedalam dari hak ulayat meliputi :

1. Masyarakat hukum/anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan liar yang hidup diatasnya.
2. Anggota suku bangsa/masyarakat hukum, untuk keperluan sendiri berhak untuk berburu, mengumpulkan hasil hutan (yang kemudian dimiliki dengan hak milik) bahkan berhak memiliki beberapa batang pohon yang tumbuh liar bila pohon itu dipelihara olehnya.
3. Mereka mempunyai hak untuk membuka tanah dengan pengetahuan kepala suku/masyarakat hukum. Pembukaan tanah dengan pengetahuan kepala suku/masyarakat hukum /desa merupakan suatu perbuatan hukum yang mendapat perlindungan dalam masyarakat hukum itu. Hubungan hak antara orang yang membuka tanah dengan tanah yang dibuka, makin lama makin kuat, bila tanah tersbut terus menerus dipelihara/digarap, dan akhirnya dapat jadi hak milik sipembuka. Sekalipun demikian hak ulayat masyarakat hukum atas tanah itu tetap ada walaupun melemah. Apabila tanah yang sudah dibuka itu kemudian dibiarkan tidak

diurus/diterlantarkan maka tanah akan kembali menjadi tanah hak ulayat masyarakat hukum/desa.

4. Oleh masyarakat hukum sendiri dapat ditentukan bagian-bagian wilayah yang akan digunakan untuk tempat pemukiman, tempat untuk makam, pengembalaan umum, sawah dan lain-lain keperluan bersama.¹⁸

Khusus untuk hak ulayat dalam persekutuan masyarakat matrilineal, Dt. B. Nurdin Yakub menyatakan bahwa tanah ulayat meliputi tanah-tanah yang belum diusahakan oleh warga persekutuan dan menjadi milik nagari dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Kata adat "*kabukik bagutiang aia, kalurah baanak sungai*".¹⁹

Selanjutnya beliau membagi tanah ulayat menjadi dua macam :

1. *Ulayat nagari*, berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, disebut hutan tinggi.
2. *Ulayat kaum*, berupa hutan yang dapat dimanfaatkan tetapi yang belum diolah, disebut hutan randah.²⁰

18. Iman Soetikonjo, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 45 - 47.

19. Lihat Dt. B. Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka 2*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1989, hal. 55.

20. *Ibid*, hal.

Dari beberapa kepustakaan yang mencoba menguraikan liku-liku seputar hak ulayat di Sumatera Barat, terlihat sedikit kerancuan dalam penempatan hak ulayat. Adakalanya hak ulayat ditempatkan dalam kategori *pusaka tinggi*, namun dipihak lain seringkali dilepaskan dengan penamaan tersendiri sebagai *hak ulayat*. Hal demikian dapat dipahami mengingat karakteristik dari harta pusaka tinggi ternyata banyak mengandung kemiripan dengan hak ulayat, terutama dalam hal larangan terjadinya peralihan, sistim pewarisan yang menganut pola hubungan *mamak-kemenakan*.

Dengan demikian, disamping terdapatnya hak ulayat yang diwariskan oleh kelompok matrilineal, baik dalam jumlah besar seperti nagari, ataupun dalam jumlah kelompok yang lebih kecil seperti kaum dan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kelompok masing-masing, bila ditinjau dari sudut asal muasal harta benda, harta pusaka (yang dapat dipusakai ahli waris) didalam masyarakat matrilineal, terdapat lagi tiga golongan harta, yakni :

1. Harta pusaka tinggi.
2. Harta pusaka rendah
3. Harta pencarian.

Harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Dalam beberapa daerah, harta seperti itu disebut *harta tua*, oleh karena sudah begitu tua

umurnya. Kekaburan asal usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal, anantara lain ialah, pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan. Kedua, karena harta itu sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.²¹

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikemukakan ciri-ciri khusus dari harta pusaka tinggi, yaitu :

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya.
2. Oleh karena itu yang memilikinya adalah kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, oleh karenanya,
3. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.²²

Sejauh ciri-ciri diatas kita hadapkan kepada hak ulayat, khususnya hak ulayat kaum, tampak sekali adanya banyak unsur kemiripan, hanya saja hak ulayat kaum belum tergarap sebagaimana layaknya pusaka tinggi kaum.

Akibat selanjutnya, bila disebutkan dengan istilah *tanah kaum*, maka dimaksudkan dengan itu bisa dalam pengertian tanah pusaka tinggi kaum

21. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 216.

22. *Ibid*, hal. 217.

(pusaka tinggi yang telah tergarap), bisa pula mengenai tanah ulayat kaum (tanah-tanah kaum yang belum tergarap).

Harta pusaka rendah yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya, seperti ninik, baik oleh ayah, atau ninik atau mamak, harta itu didapatnya melalui usahanya sendiri. Seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri, berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tetapi bila ia sudah mati, maka harta itu diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan dibawahnya. Dengan demikian, harta itu digabungkan kepada harta pusaka. Harta pusaka rendah bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.²³

Harta pencarian yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Harta hasil usaha sendiri itu dapat dipisahkan kedalam dua bentuk : Pertama ; *tembilang besi* yaitu tanah yang didapatnya melalui hasil teruko dari tanah ulayat kaum. Hasil dari perbuatan menaruko itu adalah hak bagi yang menaruko dalam bentuk "*genggam beruntuk*" dan dapat dimanfaatkannya bersama dalam keluarganya. Pengertian tembilang

23. *Ibid*, hal. 217.

besi dipergunakan, sesuai dengan alat yang dipergunakan waktu mendapatkan tanah itu.

Kedua ; *tembilang emas* yaitu harta atau tanah yang didapatnya dengan cara membeli atau memagang yang uang untuk maksud itu adalah dari hasil usahanya sendiri. Termasuk kedalam kelompok ini harta kaum yang tergadai untuk kepentingan kaum, yang ditebusnya dengan hasil usahanya sendiri selama uang tebusan itu belum dikembalikan oleh kaum.²⁴

Berbeda dengan pendapat Dt. B. Nurdin Yakub seperti telah diuraikan dimuka, Syofyan Thalib membagi hak ulayat menjadi tiga jenis : hak ulayat nagari, hak ulayat suku dan hak ulayat kaum. Sehubungan dengan itu di beberapa daerah di Sumatera Barat ada pula yang memakai istilah tanah kaum untuk ulayat kaum, tanah suku untuk ulayat suku dan tanah nagari untuk ulayat nagari.²⁵

Lebih luas dari pendapat Syofyan Thalib, Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu menyatakan :

Dalam hal ini, adat Minangkabau mempunyai ketentuan : hak yang tertinggi atas tanah adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki bersama dan tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Oleh sebab itu, yang

24. *Ibid*, hal. 218.

25. Lihat Syofyan Thalib, BPHN, *Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-tanah Adat di Indonesia*, Bina Cipta, 1978, hal. 210.

mempunyai hak ulayat adalah nagari, persekutuan dari nagari, kampung, suku, kaum dan sebagainya. Selanjutnya hak ulayat itu tidak boleh dijual atau diperlakukan sehingga dia hilang.²⁶

Penguasaan hak ulayat nagari berada ditangan *pangulu nan empat suku* selaku pimpinan suku dasar (induk suku) dialam Minangkabau. Keempat suku tersebut ialah : bodi, caniago, koto, dan piliang. Sedangkan tanah ulayat suku berada pada datuk penghulu yang berada dalam suku yang bersangkutan saja, dan penguasaan terhadap ulayat kaum ada pada tangan mamak kepala waris selaku pimpinan kaum.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara adat *Koto Piliang* dan adat *Bodi Caniago*. Menurut adat Koto Piliang yang mengenal adanya pangulu pucuk, hak ulayat berada ditangan pangulu pucuk, sedangkan menurut adat Bodi Caniago yang mengenal kesamaan hak penghulu, hak ulayat berada ditangan setiap penghulu.²⁷

Untuk hak ulayat kaum yang kepemimpinan kaum ada pada tangan mamak kepala waris (umumnya laki-laki tertua dan pandai dalam kaumnya) tidak otomatis memberi hak penuh padanya untuk mengambil kebijakan keluar terhadap tanah kaum, namun diperlukan persetujuan seluruh anggota

26. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op cit*, hal. 208.

27. Amir Syarifuddin, *Op cit*, hal. 215.

kaum perempuan dalam garis teratas. Dengan demikian anggota perempuan yang selalu menetap tinggal dalam clan kaumnya (perkawinan semenda) dan membesarkan anak-anak mereka lebih berkepentingan untuk tetap menjaga kelestarian tanah ulayat kaum agar tidak jatuh kepada pihak luar.

Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu. Dalam hubungannya keluar lingkungan kaum, terutama menyangkut peralihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan.²⁸

C. Makna Hak Ulayat bagi warga persekutuan Matrilineal dan larangan peralihannya

Terlepas dari luas sempitnya pengertian/pembagian hak ulayat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, namun dalam satu hal mereka sepakat bahwa baik hak ulayat maupun harta pusaka tinggi tidaklah boleh dialihkan

28. Haruka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963, hal. 33.

sama sekali. Keduanya hanya boleh diwariskan melalui pola hubungan mamak-kemenakan menurut garis keturunan ibu, baik itu kepada kemenakan dibawah daguak, kemenakan dibawah dado, kemenakan dibawah paruik maupun kepada kemenakan dibawah lutut.

Kemenakan dibawah daguak adalah kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kemenakan dalam kelompok ini sering juga disebut dengan *kemenakan batali darah* (kemenakan bertali darah).

Kemenakan dibawah dado adalah golongan kemenakan yang mempunyai suku sama pada satu kanagarian, namun penghulu suku berbeda. Kemenakan kelompok ini disebut juga dengan *kemenakan batali suto* (kemenakan bertali sutra).

Kemenakan dibawah paruik/pusek (perut/pusar) adalah golongan kemenakan yang mempunyai suku sama tapi berbeda kanagarian. Kemenakan kelompok ini disebut juga dengan *kemenakan batali ameh* (kemenakan bertali emas).

Kemenakan dibawah lutuik (lutut) adalah kelompok orang datang berasal dari suku dan nagari yang berbeda lantas diakui sebagai kemenakan. Mereka digolongkan orang yang "*hinggok mancakam, tabang basitumpu*" (hinggap mencengkeram, terbang bersitumpu), karena minta diakui sebagai kemenakan

dalam suku. Kelompok ini disebut juga dengan kemenakan *batali budi* (kemenakan bertali budi).

Dengan banyaknya ragam kemenakan seperti diatas, maka sedikit sekali kemungkinan suatu harta pusaka seperti hak ulayat akan kehabisan ahli waris.

Telah sejak lama masyarakat Minangkabau sadar bahwa tanah sampai kapanpun tetap akan mempunyai aset ekonomis yang sangat strategis, sebab itu selalu dipertahankan. Hak ulayat yang tak boleh diperjual belikan (*jua indak dimakan bali ; jual tidak dimakan beli*) pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan hak ulayat secara utuh agar kelak dapat menjadi tanah cadangan bagi sandaran kehidupan ekonomi anak kemenakan dibelakang hari.

Disamping itu, ternyata harta pusaka/tanah ulayat juga dijadikan sebagai simbol status sosial dalam masyarakat matrilineal. Martabat dan keaslian seseorang (agar tak dianggap sebagai pendatang) juga sering melekat pada keberadaan harta ini.

Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat sendiri meskipun mereka mempunyai "tanah tembilang emas (tanah yang dibeli atau dipagang) maka keadaan itu akan menentukan bahwa mereka bukanlah penduduk asli, melainkan disebut sebagai "orang datang", yang kadang kala dipandang lebih rendah sukunya. Masyarakat Minangkabau menyadari bahwa tanah merupakan faktor pengikat diantara mereka.²⁹

29. Syofyan Thalib, *Op cit*, hal. 213.

Karena pusaka sawah ladang, hutan dan tanah merupakan daerah ulayat (wilayah) bagi seorang penghulu tempat berkembang dan hidup kaum yang dipimpinnya. Kalau pusaka tersebut telah terjual, sukunya akan berpindah kesuku lain dengan pindahnya hak milik yang jadi wilayah tersebut, walaupun pada lahirnya pusaka tersebut masih tetap pada tempat semula. Manah orang tua akan hilang dan bangsa terdiri dari kebangsaan kaum yang berkembang diatas tanah tersebut akan kehilangan daerahnya. Maka, hilanglah bangsanya karena adanya suku bangsa adalah dengan adanya penduduk dan mempunyai daerah yang tertentu.³⁰

Timbulnya ketentuan larangan untuk memeralihkan hak ulayat pada persekutuan matrilineal, akan lebih mudah untuk dipahami, bila kita mencoba meneropong struktur masyarakat Minangkabau, yang mengenal beragam pola hubungan kekerabatan dengan segala konsekwensinya, yaitu :

1. *Hubungan orang tuo jo anak* (orang tua dengan anak).
2. *Hubungan mamak jo kamanakan* (mamak dengan kemenakan).
3. *Hubungan sumando jo sumandan* (semenda dengan pasumandan).
4. *Hubungan minantu jo mintuo* (menantu dengan mertua).
5. *Hubungan induak bako jo anak pisang* (seorang perempuan dengan anak sandara laki-lakinya).

30. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op cit*, hal. 205

Dari kelima pola hubungan ini yang perlu mendapat sorotan dan banyak kaitannya dengan hak ulayat adalah pola hubungan yang pertama dan yang kedua.

Hubungan antara orang tua terutama ibu dengan anaknya merupakan hubungan kekerabatan yang paling dekat di Minangkabau. Kedekatan hubungan ini sebenarnya telah diwujudkan sejak mulai dalam kandungan sampai kepada perawatan anak yang lebih banyak dalam asuhan belai kasih ibu. Dari realitas seperti itu adat Minangkabau menarik sianak untuk berada dan mewarisi suku/clan ibunya. Sedang sibapak yang dianggap tamu dalam clan ibu (perkawinan semenda) tetap menjadi kepala keluarga dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak istrinya.

Ungkapan adat menyebutkan :

Kaluak paku kacang balimbing

Tampuruang lenggang-lenggangan

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampuang patenggangan

(keluk paku kacang belimbing

tempurung lenggang-lenggangan

anak dipangku kemenakan dibimbing

orang kampung diperteggangan).

Seorang bapak harus bertanggung jawab untuk “memangku anak-anaknya” disamping membagi perhatian terhadap para kemenakan dan orang sekampung. Bila sianak berada dalam pangkuan maka kemenakan harus ada dalam bimbingan.

Sebagai tamu dalam clan istrinya, seorang semenda memang tidaklah diberi tanggung jawab secara kongkrit, namun sebagai seorang laki-laki yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat Minangkabau, rang semenda harus memiliki ketinggian budi, perasaan dan kearifan agar ia tidak menjadi beban dalam keluarga istrinya.³¹

Sebab itulah ia seringkali dibekali oleh kaumnya sendiri dengan dipinjamkan “*harato pambawo*” (harta pembawaan) yang lazimnya berupa setumpak tanah diambil dari hak ulayat pusaka tinggi kaumnya, untuk tempat bersawah dan berladang guna membekali ekonomi keluarganya.

Bila perkawinan bubar, baik cerai hidup atau mati, harta tersebut kembali kedalam kaum suami. Sebaliknya ia berhak pula untuk menggarap harta pusaka tinggi/ulayat kaum dari pihak istrinya. Dengan demikian ada dua sumber modal berupa tanah yang dapat diolah bagi kepentingan ekonomi sebuah rumah tanggadidalam persekutuan ini.

31. Lihat juga Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang, 1996, hal. 76.

Disamping berstatus sebagai suami, ataupun sebagai seorang bapak dalam keluarga batih, seorang laki-laki di Minangkabau juga berstatus *mamak* (paman) bagi seluruh kemenakannya, untuk kemenakan mana ia harus melakukan bimbingan yang sempurna.

Hubungan kekerabatan antara *mamak* dan kemenakan sangat dekat sekali. Ini karena hubungan mereka adalah hubungan bertali darah menurut garis keturunan ibu. Berdasarkan kedekatan hubungan ini, di Minangkabau baik pusaka harta maupun pusaka gelar diwariskan oleh *ninik* kepada *mamak* dan dari *mamak* kepada kemenakan. Jadi kemenakan adalah pewaris langsung dari seorang *mamak*.³²

Tugas selaku pembimbing kemenakan oleh seorang *mamak* dibekali dari pusaka tinggi/hak ulayat dalam kaum yang bersangkutan, yang bila tak dijumpai dapat dimintakan dari ulayat suku, dan seterusnya keatas. Dengan demikian seorang laki-laki di Minangkabau punya tanggung jawab yang luas menurut adat, yakni disamping tanggung jawab terhadap kebutuhan dalam keluarga batihnya, dengan sumber modal dari pusaka tinggi/hak ulayat kaum istri dan harta pencariannya atau juga dari sedikit harta pembawaan, juga tanggung jawab terhadap semua kemenakan dengan sumber modal harta ulayat kaumnya sendiri. Sebaliknya, dari pola hubungan kekerabatan seperti diatas, anak-anak yang berada dalam suatu rumah tangga di Minangkabau

32. *Ibid*, hal. 12.

mendapat dua dinding sandaran yang kukuh, pertama adalah dari orang tua, kedua dari mamaknya. Seumpama ayah tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka masih ada mamak. Andaipun mereka anak-anak ditinggal mati oleh ayah ataupun paman, kehidupan tetap dapat dilanjutkan dengan bermodal harta pusaka kaum nan tak akan pernah pupus bila ketentuan adat ditaati.

Hamka mengungkapkan :

Di Minangkabau dengan adanya pusaka tinggi itu menjamin hidup anak kemenakan. Diantara daerah-daerah yang tidak terlalu parah karena ancaman kelaparan dizaman Jepang ialah Minangkabau karena pusaka tingginya.³³

Walaupun pada prinsipnya tanah pusaka tinggi/hak ulayat tidak boleh diperalihkan, namun dalam situasi berikut, tanah ulayat dapat digadaikan atau dijual sementara, yakni bila tak ada jalan lain untuk menyelenggarakan :

1. *Maik tabujua tengah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah).
2. *Gadiah gadang ndak balaki* (gadiah dewasa yang tidak (kunjung) bersuami).
3. *Rumah gadang ketirisan* (rumah gadang ketirisan).
4. *Membangkit batang tarandam* (membangkit batang terendam).³⁴

33. Lihat Dt. B. Nurdin Yakub 2, *Op cit*, hal. 11. Beliau sendiri menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan dari sistim matrilineal dibidang pertanahan, antara lain, menghilangkan individualisme, mempertahankan harta benda, menghindarkan pengemisn, menghilangkan pengangguran dan meniadakan anak terlantar.

34. lihat juga Dt.B. Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka* 3, hal.23,dan Chairul Anwar, *Op cit*, hal. 94.

Seluruh situasi diatas mengisyaratkan kepada keadaan keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera, karena bila tak dilakukan akan membawa malu berkepanjangan dan merusak citra persekutuan.

Bila tak satupun muncul peristiwa diatas, lantas oleh pemegang pimpinan adat dilakukan peralihan hak yang melanggar adat, maka konon yang bersangkutan akan terkena sumpah pasatiran : "*kaateh indak bapucuk, kabawah indak baurek, ditengah digirik kumbang*". Sipelanggar adat akan terkena "*sumpah pasatiran*" dari nenek moyang, dan jadilah ia hidup merana tak berguna laksana sebatang kayu yang "*keatas tak berpucuk, kebawah tak berurat (berakar) dan ditengah (tengah batang) digirik (dilobangi) kumbang pula*".³⁵

Sumpah pasatiran diyakini lambat laun akan menimpa mereka yang berani memeralihkan tanah ulayat dengan cara-cara melanggar adat, tetapi tidak terhadap mereka yang melakukannya berdasarkan alur dan patut (menurut adat). Penggunaan/penggarapan tanah ulayat melalui perolehan tanah secara menurut alur dan patut ini memang diperbolehkan oleh adat dengan keharusan bagi calon penggarap untuk menunaikan "*adat diisi, limbago dituang*", yang umumnya berupa :

35. Lihat Dr. B. Nurdin Yakub, 2, *Op cit*, hal. 41.

1. Pembayaran bunga kayu.
2. Pembayaran bungo aleh.
3. Pembayaran bungo ampiang
4. Pembayaran bungo tanah.³⁶

Lazimnya jumlah pembayaran tersebut berkisar sekitar 10% dari hasil yang diperoleh. Begitu izin penggunaan yang diberikan habis, maka berlaku adat : "*kabau tagak kubangan tingga*" (kerbau tegak (berdiri) kubangan tinggal).³⁷

Ungkapa adat diatas menganalogikan penggunaan hak ulayat oleh pihak lain dengan seekor kerbau yang usai berkubang pada suatu tanah berlumpur, pergi tanpa bisa membawa kubangannya. Dimaksudkan adalah dengan selesai penggunaan hak ulayat oleh pihak lain maka hak tersebut kembali kedalam milik persekutuan.

Dengan memahami struktur masyarakat Minangkabau, terutama pola hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan, akan dapat dipahami larangan adat terhadap terjadinya peralihan hak ulayat keluar anggota persekutuan.

36. Lihat Dt. B. Nurdin Yakub, 2, *Op cit*, hal. 56 dan Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op cit*, hal. 210.

37. *Ibid*, hal. 209.

D. Hak Ulayat, Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Sosial

Seiring dengan kemajuan teknologi pertanian, penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan pengembangan ekonomi kian dirasakan. Banyak negara agraris seperti Indonesia, mencoba mengembangkan barang-barang ekspor selain minyak tanah dan gas bumi kepada jenis komoditas lain yang laku dipasar dunia. Hasil perkebunan berupa sawit/minyak sawit akhir-akhir ini justru menjadi primadona. Tak pelak, tanah-tanah subur yang cocok untuk tanaman jenis ini (lebih-lebih karena kondisi pasar yang kian terbuka) menjadi incaran para pengusaha baik asing maupun domestik.

Untuk lebih mempercepat lajunya tingkat perekonomian bangsa, pemerintah Indonesia sudah sejak lama mencoba membuka kran dengan mengeluarkan seperangkat aturan yang diharap dapat mengundang minat para investor, baik asing maupun domestik untuk berinvestasi antara lain dibidang perkebunan di wilayah Indonesia, dengancara memberikan kepada pengusaha kemungkinan memperoleh hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, melalui perolehan biasa ataupun melalui pencabutan dan pembebasan hak atas tanah seperti diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1961 dan permendagri nomor 15 tahun 1975.

Sekalipun didalam pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, dan adanya pengakuan terhadap hak ulayat didalam pasal 3 UUPA, namun pemberlakuan

hukum adat tersebut adalah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa. Artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dengan hak ulayatnya dapat saja dikalahkan. Disini tampak bahwa masyarakat hukum adat digiring kearah perubahan yang dimaui oleh hukum.

Tanpa digiringpun, sebenarnya tidak ada suatu masyarakatpun yang statis.

Baik dengan cara cepat ataupun secara lambat, mereka terus berubah.

Soerjono Soekanto menyatakan : tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu didalam perkembangannya.³⁸

Minangkabau adalah satu dan merupakan jumlah terbesar dari sedikit kelompok masyarakat didunia bersistim matrilineal, yang ganjilnya tidak satupun ciri-ciri umum dari masyarakat matrilineal yang lain itu terdapat diranah Minangkabau. Masyarakat Minang yang perantau, dinamis, dan memiliki susunan masyarakat yang kompleksitas adalah merupakan perbedaan-perbedaan yang menyolok dengan masyarakat matrilineal diluarnya.³⁹

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengklassifikasi masyarakat antara masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang

38. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, 1988, hal. 87.

39. Lihat juga Amir B, *Minangkabau Manusia dan Kebudayaan*, FKPS IKIP Padang, 1980, hal. 13.

statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat yang *dinamis* merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan dengan cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progress), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dalam masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu.⁴⁰

Masyarakat memang terus berubah. Mereka yang semula berada dan terkurung dalam ruang lingkup kehidupan yang bercorak tradisional, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi menapak menjadi masyarakat yang lebih modern, entah karena digerakkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam situasi seperti ini, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai *sarana rekayasa sosial*.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa hukum itu tidaklah punya kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial. Pendapat seperti ini diantaranya dianut oleh Savigny dengan aliran sejarahnya serta Sumner dan Marx. Savigny berangkat dari konsepsinya tentang hukum yang tumbuh

40. Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal. 89.

dibelakang mores. Hukum kemudian hanya memberikan pengesahan saja terhadap mores selaku norma informal yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat.

Di sini Savigny sepaham dengan Sumner yang mengemukakan bahwa norma-norma informal (mores) senantiasa mendahului norma-norma hukum, sedangkan norma-norma informal itu sendiri tak dapat dirubah oleh hukum. Perubahan terhadap norma-norma informal itu hanya mungkin melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama, apabila secara substansial perubahan itu dikerjakan sendiri oleh kekuatan dalam masyarakat.⁴¹

Teori klasik dari Marx juga tidak dapat menerima penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, karena menurutnya hukum itu merupakan struktur atas ekonomi dan teknologi. Ekonomi dan teknologilah yang lebih dulu berkembang dan hukum hanya mengikutinya. Dengan demikian berarti pula hukum ketinggalan oleh perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi dan teknologi, sekalipun ia juga mengakui hukum itu dapat dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kebijaksanaan.

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya

41. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal.112.

dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.⁴²

Proses menciptakan pola-pola kelakuan baru dengan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang dipandang yang tidak sesuai, merupakan institusionalisasi di bidang hukum untuk menuju kepada kelembagaan yang sempurna.

Abu Ahmadi menyebutkan bahwa proses perkembangan lembaga-lembaga dinamakan *institusionalisasi* (pelembagaan) dan proses ini terjadi bilamana sesuatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya sehingga diminta agar anggota masyarakat tersebut mematuhi. Proses demikian terjadi dimana-mana dan terumuskan dalam masyarakat.⁴³

Cohen (1983) menyatakan bahwa institusionalisasi adalah perkembangan sistem yang teratur dari norma-norma, peranan-peranan yang ditetapkan dan diterima masyarakat. Laomis (1960) menyatakan bahwa proses institusionalisasi menyangkut semua unsur dan proses sosial yang ada, maka selanjutnya

42. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 206.

43. Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 62.

untuk normalah dianggap lebih penting (utama). Soejono Soekanto (1983) menyatakan bahwa institusionalisasi (pelembagaan) adalah proses dimana unsur norma menjadi bagian dari suatu lembaga.⁴⁴

Proses pelembagaan ini dapat terjadi dengan membongkar semua nilai-nilai yang dianggap kuno, dan membentuk kelembagaan baru dengan isi yang sama sekali baru, namun dapat pula terjadi dengan tetap memakai bingkai lama dengan substansi yang memuat nilai-nilai baru.

Pelembagaan hukum yang memperkuat terjadinya perubahan sosial, bisa saja berawal dari peranan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan.

Filsuf marxis seperti Karl Marx memang menepis pendapat bahwa agama dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial.⁴⁵ Namun kini diakui bahwa perubahan-perubahan sosial adalah hasil dari proses yang amat kompleks, dimana antara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menentukan. Faktor-faktor ekonomi dan sosial memang mempengaruhi sistem-sistem nilai dan keyakinan agama beserta pengembangannya. Tetapi sebaliknya agama dan sistem nilai budayapun mempengaruhi faktor-faktor ekonomi dan sosial.⁴⁶ Bahkan menurut Weber,

44. *Ibid*, hal. 63.

45. Franz Magnis-Suseno, *Ketua dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 77.

46. *Ibid*, hal. 77.

agama Kristen Protestan aliran Calvinis yang menjadi titik tolak perkembangan cara produksi yang kapitalis.

Pendapat diatas didukung oleh banyak pemikir lain seperti Ernst Bloch dan Milan Machovec yang juga meyakini bahwa agama dapat juga menjadi suatu kekuatan yang revolusioner.⁴⁷

Hal seperti inipun bukan mustahil terjadi di Minangkabau yang hukum adatnya bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah. Syarak mangato adat memakai.⁴⁸

Hasil penelitian sarjana Jepang membuktikan bahwa warga persekutuan matrilineal jauh lebih tinggi keyakinan agamanya dibandingkan dengan daerah Jawa khususnya.

Tiga ciri penting dari suku Minangkabau adalah kepercayaan yang kuat pada Islam (bertentangan dengan Jawa yang lebih sinkretis), suka merantau dan terutama sistem keluarga matrilineal.⁴⁹

47. Lihat Franz Magnis-Suseno, *Ibid*, hal. 78.

48. Maksudnya setiap yang disebut oleh syariat Islam harus dipakaikan kedalam adat Minangkabau, lihat hal ini dalam Idrus Hakimy Dt. Rajo Pengulu, *Op cit*, hal. 21.

49. Akira Nagazumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang. Perubahan Sosial Ekonomi abad XIX dan XX dan berbagai aspek Nasionalisme Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 79 – 80.

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakat, sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim, pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistem hukum yang dipakainya. Durkheim membedakan antara "masyarakat dengan solidaritas organik". Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada individualitas dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat solidaritas mekanik dipertahankan oleh sistem hukum represif, sedangkan masyarakat solidaritas organik oleh sistem hukum restitutif. Sistem hukum represif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas mekanik, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum restitutif juga sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organik, oleh karena sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari pihak yang mengadakan hubungan tersebut.

Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem

hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *Social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari indentifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari pengarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang

berpendapat, bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut dimuka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian itu berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Disini kembali kita diingatkan kepada tahap-tahap social engineering tersebut dimuka.⁵⁰

Weber, seorang ahli sosiologi modern membicarakan tentang perkembangan hukum sehingga sampai kepada bentuknya yang sekarang ini, dominasi itu bertolak dari struktur yang kharismatik dan tradisional menuju ke struktur yang legal rational. Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat Barat membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya.⁵¹

⁵⁰. Satjipto Rahardjo, *Op cit*, hal. 207 – 211.

⁵¹. *Ibid*, hal. 293.

Didalam meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial, Weber sangat memperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik didalam suatu negara dengan hukumnya. Cara-cara penyelenggaraan hukum dan peradilan masalah menurut Weber bersumber pada cara-cara perdamaian (conciliatory) antara kelompok-kelompok suku yang bersengketa. Tetapi bila kekuasaan politik disitu didalam menjalankan roda pemerintahan makin bersifat rasional, maka akan makin besar pula kemungkinannya proses hukum didalam masyarakat itu dijalankan secara rasional pula. Sesuai dengan makin meningkatnya sifat rasional pengorganisasian, maka bentuk-bentuk irasional yang dipakai semakin ditinggalkan, sedangkan hukum material akan mengalami sistimatisasi, yang berarti bahwa keseluruhan bidang hukum mengalami rasionalisasi.⁵²

Ada satu hal yang menarik dari pandangan Weber, sekalipun ia mengakui bahwa teori rasionalitasnya dapat dipengaruhi faktor-faktor eksternal, seperti agama, namun ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat diakibatkan oleh tuntutan ekonomi.

52. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 105

Pendapat Weber mengenai yang disebut belakangan ini bersifat negatif, artinya ia menolak pandangan, bahwa perkembangan dari hukum bisa dijelaskan sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi.⁵³

Ok. Chairuddin seperti dikutip dari Ritzer mengatakan : paradigma definisi sosial, adalah merupakan salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*). Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti (bermakna). Mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusia sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi-segi prinsipil dari kehidupan sosial⁵⁴

Teori interaksionisme simbolik mencoba untuk lebih mempertajam teori aksi yang dikemukakan Weber, dengan menyatakan bahwa interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol dan melalui kulturenya, masyarakat menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol tersebut simbol-simbol mana ikut memberikan pembatasan terhadap tindakan individu.

Sedikit berbeda dengan paradigma definisi sosial, teori fungsionalisme struktural dalam paradigma fakta sosial justru memusatkan perhatiannya kepada struktur sosial dan pranata sosial. Hampir semua penganut teori ini seperti

53. Satjipto Rahardjo, *Op cit*, hal. 295.

54. Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44.

Robert K. Merton punya asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain dengan saling menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Merton juga mengingatkan agar jangan terjadi pencampuran antara motif-motif subyektif dengan pengertian fungsi. Perhatian fungsionalisme struktural harus lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi menurutnya adalah akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi dalam suatu sistem, namun karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka dapat pula menimbulkan disfungsi. Beliau memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Artinya struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia dapat pula menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Institusi sosial tertentu dapat fungsional bagi suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya disfungsional bagi unit sosial yang lain.⁵⁵

Safjipto Rahardjo menyatakan bahwa untuk meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial, lebih dulu perlu dilihat tempat hukum itu didalam kerangka masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini suatu teori yang dikembangkan Talcott Parsons menjelaskan ; kerangka masyarakat yang serba meliputi itu bertitik tolak dari tindakan individu. Bahkan dapat juga dikatakan,

55. George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.26.

bahwa teori Parsons merupakan penggambaran yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perkaitannya yang luas.

Pada teori Parsons, tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang berstruktur. Tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu sistim yang besar dan yang terbagi atau terurai kedalam sub sistem sosial yang mempunyai fungsi primer untuk tujuan integrasi, sub sistem budaya yang berfungsi primer untuk mempertahankan pola sub sistem kepribadian dengan fungsi primernya untuk mencapai tujuan, serta sub sistem organisme kelakuan dengan fungsi primer untuk beradaptasi. Diantara sub sistem-sub sistem itu terdapat fenomena saling merasuki satu sama lain, sehingga menimbulkan wilayah-wilayah saling perasukan.

Dengan demikian perhatian Parsons tertuju kepada penyusunan suatu konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya.⁵⁶

Dalam skemanya Parsons menyusun unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

⁵⁶. Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1983, hal. 25 - 30.

1. Adanya individu selaku aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut adalah merupakan situasi dan kondisi yang sekaligus sebagai alat yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya jenis kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada dibawah kendala dan nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Misalnya kendala kebudayaan.⁵⁷

Sehubungan dengan perihal hukum dan perubahan sosial ini, terutama dalam peranannya sebagai sarana untuk melakukan "social engineering", oleh Satjipto Rahardjo, UUPA yang merupakan peraturan dasar dibidang pertanahan dimasukan kedalam kategori penggunaan hukum sebagai sarana SE (social engineering), oleh karena ia tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan struktural dalam hubungan antara orang dan tanah di Indonesia, melainkan suatu perubahan struktural yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang lain, terutama perubahan proses sosial, namun sebagai sarana SE, UUPA tak luput dari kekurangan-kekurangan yang menyertainya, antara lain :

57. Ok. Chairuddin, *Ibid*, hal. 45.

1. Perombakan struktur pemilikan tanah yang semestinya merupakan bagian dari suatu usaha perubahan yang lebih besar kurang dilakukan dengan sistematis dan berencana.
2. Suasana yang meliputi pembuatan UUPA terutama nampak dikuasai oleh romantisme, seperti sikap terhadap penjajah serta citra dan penghargaan yang diletakkan pada hukum adat. Pemikiran serta siasat ekonomi kurang sekali memperoleh tempatnya, padahal bidang yang dimasuki oleh UUPA ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kegiatan ekonomi.⁵⁸

Masalah pertama yang dihadapi UUPA sebagai sarana untuk melakukan SE adalah berhubungan dengan kedudukannya sebagai suatu peraturan dasar dibidang agraria. Dalam kedudukannya yang demikian itu ia barang tentu hanya dapat diharapkan untuk sampai pada pengadaan tentang azas-azas dan pemberian pengarahannya yang umum sifatnya. Oleh karena itu keberhasilannya sebagai sarana SE untuk bagian terbesar akan tergantung pada peraturan-peraturan yang menjabarkannya.⁵⁹

58. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, *Op cit*, hal. 181, 182.

59. *Ibid*, hal. 173 - 174.

BAB III

PENGUNAAN HAK ULAYAT OLEH PENGUSAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI PASAMAN

A. Hasil Penelitian

1. Monografi wilayah penelitian

Kabupaten daerah tingkat II Pasaman adalah satu dari 14 buah daerah tingkat II yang ada dalam Propinsi Sumatera Barat dan wilayahnya sangat potensial untuk dikembangkan jadi usaha perkebunan. Kabupaten Pasaman yang secara administrasi disebelah utara berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), sebelah selatan dengan Kabupaten Agam, sebelah timur dengan Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Riau, serta sebelah Barat dengan Samudra Indonesia, terdiri dari 10 Kecamatan dengan luas seluruhnya mencapai 7.835,40 Km² (merupakan Kabupaten dengan daerah terluas dalam Propinsi Sumatera Barat, atau mencakup 18,52 % dari luas propinsi ini)

Topografinya yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Barat Laut menuju Tenggara Sumatera, dan berketinggian antara 2 sampai 40 M dari permukaan laut menyebabkan wilayah ini mempunyai suhu yang bervariasi antara sedang dan panas.

Menurut Taufik Martha selaku Bupati Kepala Daerah Tk II Pasaman, lahan yang telah digarap baru mencapai 22,2 % dari luas Kabupaten di atas. Selanjutnya luas lahan serta penggunaannya di Kabupaten Pasaman secara terinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Keadaan/Penggunaan Tanah dan Luasnya di Kabupaten Pasaman

No.	Keadaan /Penggunaan	Luas (Ha)	Porsentase
1.	Perkampungan	14.544	1.89
2.	Sawah	53.229	6.79
3.	Tegalan/ladang	14.537	1.86
4.	Perkebunan	119.035	15.19
5.	Kebun Campuran	18.706	2.39
6.	Hutan Lebat	423.697	54.07
7.	Hutan Belukar	76.929	9.82
8.	Hutan Sejenis	4.748	0.48
9.	Semak Alang-alang	32.354	4.13
10.	Danau/Rawa	26.700	3.42
	Jumlah	7.835.400	100.00

Kabupaten Pasaman pada zaman Kolonial Belanda termasuk 2 dari 4 Onder Afdeling Agam yang mencakup :

1. Agam Tuo
2. Maninjau
3. Lubuk Sikaping
4. Ophir

Sesudah kemerdekaan, Onder Afdeling Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam, sedangkan Onder Afdeling Lubuk Sikaping dan Ophir digabung menjadi Kab. Pasaman yang resmi berdiri pada 8 Oktober 1945 dengan Ibuk Kota Lubuk Sikaping. Semenjak zaman Kolonial pula, terutama untuk daerah sekitar Onder Afdeling Ophir telah digunakan oleh penjajah untuk wilayah perkebunan dengan mendatangkan banyak kuli kontrak dari pulau Jawa dengan nasib yang hampir sama seperti halnya mereka yang didatangkan ke daerah wilayah deli di Sumatera Utara.

Kini Kabupaten Pasaman yang dihuni oleh sejumlah \pm 495.074 penduduk (data tahun 1996) mempunyai 10 Kecamatan, yakni :

1. Sungai Beremas
2. Lubuk Malintang
3. Pasaman
4. Bonjol
5. Lubuk Sikaping
6. Talamau
7. Panti
8. Rao Mapat Tunggul
9. Gunung Tuleh
10. Kinali

Dari semua Kecamatan di atas perusahaan perkebunan banyak berada di wilayah kecamatan Pasaman dan Kinali, baik itu dikelola oleh perusahaan PMDN maupun PMA. Disamping karena keadaan alamnya yang tidak banyak perbukitan, juga kedua wilayah ini sangat subur untuk ditanami Kelapa Sawit yang jadi tanaman primadona bagi usaha perkebunan akhir-akhir ini.

Kecamatan Pasaman dengan Ibu Kota Simpang Empat berpenduduk 84.819 jiwa, yang tersebar pada luas areal 789.41 Km², dan Kecamatan Kinali dengan jumlah lebih kurang 43.914 Jiwa dengan luas wilayah 482.69 Km² Hampir 77% dari jumlah penduduk pada 2 kecamatan ini bekerja di sektor pertanian, sedang sisanya tersebar pada kegiatan perdagangan, Pegawai Negeri, dan sebagainya.

Data pada kantor Kecamatan Pasaman menunjukkan bahwa penduduk pada kedua Kecamatan di atas bekerja pada sektor berikut :

Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Penduduk di Lokasi Penelitian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Penggarap	87.891
2.	Buruh Tani	11.227
3.	Pengusaha Sedang	3.276
4.	Pengrajin Kecil	1.592
5.	Buruh Industri	992
6.	Buruh Kebun	1.702
7.	Pedagang	10.458
8.	Angkutan	361
9.	Pegawai Negeri Sipil	1.196
10.	ABRI	44
11.	Peternakan	6.091

Sebelum tahun 1996, Kinali yang terdiri dari 13 buah desa masih bergabung kedalam Kecamatan Pasaman yang secara geografis memang berbatasan langsung dengan daerah ini. Setelah itu Kinali menjadi Kecamatan Perwakilan dengan nama yang sama. Sedangkan Kecamatan Pasaman sendiri tinggal memiliki 26 desa.

Untuk menampung sejumlah masyarakat di atas dibidang pendidikan, terdapat sarana untuk keperluan itu sebanyak 16 buah TK, 104 SD, 8 buah SLTP, 5 SLTA, dan 1 buah Perguruan Tinggi. Dibidang keagamaan tersedia 106 Mesjid, 202 langgar, dan 23 mushalla. Untuk kepentingan peribadatan

umat Nasrani yang umumnya datang dari luar daerah ini tersedia 2 buah Gereja di Kecamatan Pasaman. Warga yang Non Muslim ini ada yang berasal dari mereka yang ikut transmigrasi, maupun dari kuli kontrak peninggalan zaman kolonial dan pendatang yang atas kemauan sendiri berupaya mencari hidup di wilayah ini.

2. Penggunaan Tanah Ulayat dan Alasan Masyarakat Setempat Dalam Melepaskan Tanah Ulayat Mereka.

Masyarakat Kabupaten daerah Tk II Pasaman, khususnya di Kecamatan Pasaman dahulunya, telah lama mengenal kelapa sawit dan tebu sebagai tanaman perkebunan. Perkebunan Ophir yang dirintis Belanda di daerah ini telah banyak menghasilkan devisa untuk kepentingan negeri Kincir Angin tersebut, sekalipun masyarakat setempat dengan buruh-buruh yang banyak didatangkan dari Jawa tetap terperangkap dalam kemiskinan.

Dengan menggunakan kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu mengklaim wilayah sekitar ophir yang sangat cocok untuk perkebunan sawit dan tebu sebagai domein negara, karena tidak terdapat pembuktian yang kuat atas kepemilikan masyarakat setempat terhadap tanah tersebut. Hal ini secara nyata mengingkari keberadaan kepemilikan Tanah Ulayat yang dikenal dalam masyarakat matrilineal. Masyarakat setempat tak dapat berbuat apapun untuk mempertahankan haknya, kecuali pasrah

sebagaimana layaknya masyarakat terjajah yang sarat dengan ketidakberdayaan. Jadi pada waktu itu pelepasan tanah-tanah hak ulayat atau lebih tepatnya perampasan tanah-tanah hak ulayat berhasil diperoleh melalui kekuasaan dan ketidak berdayaan masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Jangankan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintahan kolonial, untuk berkata "tidak" pun membutuhkan nyali yang betul-betul kukuh. Jikapun berani dilontarkan, tidak berarti perkebunan pemerintah Belanda urung dilakukan. Ucapan itu hanya akan menggema tanpa makna dan tanggapan. Kafilah akan tetap lalu, sekalipun banyak anjing menggonggong.

Semula dengan menyatakan tanah-tanah tersebut sebagai hak erpacht, pemerintah mencoba kembali mengulang kejayaan perkebunan di lokasi sekitar Ophir, namun berbenturan dengan kepentingan rakyat yang menganggap tanah tersebut adalah ulayat mereka yang telah dirampok kolonial. Penelitian yang penulis lakukan pada tahun 1989 pada daerah-daerah yang punya perbatasan langsung dengan daerah ophir menunjukkan bahwa banyak tanah-tanah diklaim pemerintah sebagai hak erpacht peninggalan Belanda juga dianggap oleh rakyat setempat sebagai Tanah Ulayat mereka. Hal ini diperkuat dengan telah banyaknya anggota masyarakat persekutuan menggarap sebahagian tanah tersebut setelah kepergian Belanda.

Setelah melalui masa krisis dan mengalami keha nuran total pada zaman Jepang, perkebunan ini kembali dibuka pada tahun 1981 dengan tanaman kelapa sawit pada areal seluas 8.056 Ha yang terbagi dalam bandingan 3.256 Ha untuk perkebunan inti dan 4.800 Ha untuk plasma. Pengembangan kebun yang dibiayai atas bantuan kredit pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) dikelola oleh PT Perkebunan VI dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Artinya disamping memiliki kebun inti sebagai milik dari pengelola diikutsertakan rakyat setempat yang waktu itu berjumlah 2.400 KK sebagai anggota pemilik dalam areal kebun plasma. Dan inilah cara kompromi terbaik dalam mencari titik tengah antara kepentingan Pemerintah dengan rakyat setempat saat itu, sehingga status hak atas tanah tidak lagi berlarut-larut dipersoalkan.

Pada tahun 1985 kebun ini mulai berproduksi dengan menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebanyak 178 ton dan bahkan pada tahun 1995 meningkat menjadi 65.408 ton (rata-rata 20,9 ton/Ha). Pembangunan perkebunan ini menurut Bupati Pasaman Taufik Martha secara keseluruhan telah mampu meningkatkan taraf hidup petani ophir yang sampai tahun 1996 memperoleh sekitar Rp 750.000/KK per bulan. Diantara mereka banyak yang berhasil menyisihkan pendapatannya sekitar Rp 175.000/bulan untuk ditabungkan. Berdasarkan keberhasilan proyek PIR Ophir yang dikelola

pemerintah melalui PTP VI, mendorong masyarakat setempat untuk membuka lahan perkebunan sawit secara mandiri dan memancing banyak pengusaha untuk melakukan investasi disana. Pemerintah daerahpun menurut Bupati telah mencadangkan lahan seluas sekitar 149.905 Ha untuk dikelola para investor yang berminat melalui pola kemitraan. Diluar PTP VI, saat ini tercatat sejumlah pengusaha perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman, baik yang dikelola oleh PMA maupun PMDN. Rinciannya terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Perusahaan Perkebunan Sawit di Kabupaten Pasaman

No	Nama Perusahaan	Luas Pencadangan Lahan (Ha)	Jumlah Anak Angkat	
			Klp	Luas (Ha)
1.	PT. BPP	16.000	16	12.028
2.	PT. Pasaman Marama	5.000	5	6.150
3.	PT. Agro Wiratama	8.400	2	1.400
4.	PT. Anam Koto	6.300	7	1.500
5.	PT. Gersindo MP	3.600	3	2.150
6.	PT. Inkud Agritama	4.600	16	8.810
7.	PT. Pasaman Permai	2.455	-	-
8.	PT. Trisangga Guna	11.600	-	12.000
9.	PT. Mutiara Agam	31.000	-	600
10.	PT. Bintara Tani N.	7.000	-	1.800
11.	PT. Permata Hijau P.	3.850	4	4.100
12.	PT. Primatama Mulya J.	3.000	3	3.250
13.	PT. Arinda Pasaman P.	4.192	2	1.940
14.	PT. Gonjong Limo Crops	500	2	1.900
15.	PT. Tulas Sakti Jaya	590	1	800
16.	PT. AMP	1.300	-	-
17.	PT. Agri Mitra Utama P.	500	1	500
	Jumlah	81.987	62	48.128

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat

Tidak seluruh perusahaan di atas berlanjut mengadakan usaha perkebunan sawit, walaupun izin untuk sebahagian luas pencadangan lahan bagi keperluan tersebut telah diberikan. Ada diantaranya yang tidak jadi melanjutkan usahanya karena dihadap berbagai faktor internal dan external. Dari 13 perusahaan yang terus mengelola usaha perkebunan kelapa sawitnya, 8 perusahaan memilih lokasi di kecamatan Pasaman dan Kinali. Tabel berikut menggambarkan identitas sejumlah perusahaan yang melanjutkan operasinya di 2 kecamatan tersebut :

Tabel 3.4. Perusahaan Yang Merealisisasi Usaha

No.	Nama Perusahaan	Status	Rencana	Realisasi (1996)
1.	PT. Pasaman Permai	PMDN	2.500	1.561
2.	PT. Trisangga Guna	PMDN	7.000	5.500
3.	PT. Anam Koto	PMA	7.000	1.200
4.	PT. Gersindo MP	PMA	7.000	2.930
5.	PT. Tunas Rimba	PMDN	300	250
6.	PT. Inkud Agritama	PMDN	12.050	6.722
7.	PT. Permata Hijau	PMDN	12.000	5.450
8.	PT. AMP	PMA	12.000	4.282

Sumber : BKPMMD Sumatera Barat

Menurut Z. B. Yang Dipertuan selaku Ketua KAN Kinali dan Ali Amran Ismail Dt. Rajolelo selaku Ketua KAN Lingkung Aur, lebih 80% dari seluruh luas pencadangan tanah yang diberikan izin kepada sejumlah perusahaan

perkebunan sawit diatas berasal dari tanah ulayat, terutama dari tanah ulayat suku dan nagari. Sisanya berasal dari konversi hak atas tanah erpacht menjadi HGU bagi pengusaha .

Disamping sejumlah perusahaan perkebunan sawit diatas yang menjalankan usahanya di lokasi ini, terdapat pula sejumlah usaha perkebunan pribadi yang dikelola secara mandiri oleh pemilik, baik dilakukan oleh masyarakat setempat maupun para pemodal kecil yang datang dari luar. Para pemilik perkebunan pribadi ini pada umumnya melakukan pembelian lahan kepada masyarakat setempat , lahan mana bisa berasal dari hak perseorangan maupun dari tanah ulayat.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat persekutuan matrilineal di lokasi penelitian bersedia melepaskan tanah ulayat mereka kepada pengusaha perkebunan. Wawancara yang dilakukan terhadap 100 responden terdiri dari *tigo tungku sajarangan* (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai) dan para anak kemenakan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 25 orang, hasilnya diangkat kedalam tabel berikut:

Tabel 3.5. Alasan Pelepasan Tanah Ulayat

Responden	Alasan-alasan Peralihan Tanah Ulayat						Jumlah
	Alasan Ekonomis	Alasan Religius	Pelepasan Tidak Untuk Selamanya	Pelepasan Untuk Selamanya	Tekanan dari Pemerintah	Trauma Masa Lalu	
1. Nenek Mamak	15	12	20	3	20	13	83
2. Alim Ulama	10	10	15	8	25	10	78
3. Cerdik Pandai	17	20	12	5	18	12	84
4. Anak Kemenakan	20	18	25	0	21	3	87
Jumlah	62	60	72	16	84	38	332

Tabel di atas tidaklah menunjukkan bahwa satu responden hanya memberikan satu alasan, melainkan mereka diberi kebebasan mengemukakan semua yang mereka lihat dan rasakan. Dari data yang tertera dalam tabel di atas, tampak fakta bahwa ada enam alasan penyebab terjadi pelepasan hak ulayat, yakni:

1. Adanya tekanan ekonomi serta harapan-harapan terhadap keuntungan-keuntungan ekonomi (18,6%)
2. Alasan religius (18,1%)
3. Pelepasan tidak berarti memutuskan hubungan hukum antara pemilik dengan obyeknya semula (21,7%)
4. Pelepasan itu disadari sebagai pelepasan untuk selamanya (4,8%)
5. Tekanan dari penguasa (25,6%)
6. Trauma masa lalu (11,2%)

14 responden, diantaranya Nazif Datuk dan Datuk Sarawi yang merupakan dua tokoh pemangku adat menolak pandangan bahwa tekanan ekonomi warga penyebab terjadinya pelepasan hak, sebab menurut mereka kehidupan ekonomi anak kemenakan di lokasi penelitian tidaklah begitu buruk, namun bila keuntungan ekonomi yang dijanjikan pengusaha dan penguasa untuk kelak diterima maka ia dapat dijadikan alasan pelepasan hak.

Alasan-alasan yang bersifat religius lebih ditujukan oleh responden kepada tiadanya larangan menurut syari'at dalam pelepasan tanah serta larangan memubazirkan sesuatu dengan cara menterbengkalakannya.

Dari tabel di atas terungkap sebagian responden menyatakan pelepasan hak tidak memutuskan kepemilikan, artinya seusai penggunaan tanah ulayat oleh pengusaha maka hak atas tanah tersebut harus dipulihkan kedalam statusnya semula sebagai hak ulayat, sedangkan sebagian lain menganggap hubungan kepemilikan itu menjadi hapus selamanya.

Tekanan dari elit kekuasaan, menurut responden dilakukan oleh aparat pemerintahan pada Pemda Tingkat II dan Kecamatan yang dengan secara mudah memasukkan kedalam kelompok pembangkang pembangunan terhadap pemilik yang menolak penyerahan hak dan tekanan-tekanan lainnya.

Trauma terhadap masa lalu juga menggelayuti pikiran responden yang sangat takut terhadap kekuasaan Kolonial Belanda pada waktu dulu dan menimbulkan kesan pemerintah seolah-olah tak boleh dibantah.

3. Pola Pelepasan Tanah Ulayat.

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa tanah ulayat yang dijadikan untuk usaha perkebunan sawit oleh beberapa perusahaan perkebunan, umumnya berasal dari tanah ulayat suku dan ulayat nagari. Disamping itu usaha perkebunan pribadi yang dikelola perorangan banyak pula beroperasi disini, baik dibuka oleh penduduk setempat maupun pengusaha yang datang dari luar dengan kebanyakan menggunakan tanah yang berasal dari ulayat kaum maupun tanah hak milik perorangan.

Tanah ulayat, baik itu berupa tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, apalagi tanah ulayat nagari, belumlah lagi mempunyai sertifikat hak atas tanah. Akibatnya pelepasan hak ulayat tidak dapat dilakukan dengan balik nama begitu saja seperti halnya jual beli hak atas tanah yang telah bersertifikat.

Memang dijumpai juga tanah kaum telah bersertifikat yang dijual kepada perorangan, dimana pemegang hak terakhir ini menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan usaha perkebunan sawit, tetapi tanah kaum dimaksud tidak lagi berstatus sebagai tanah ulayat (dalam hal ini tanah ulayat kaum) melainkan telah menjadi hak milik perorangan yang dihaki oleh beberapa orang karena telah saking lamanya tanah itu dibuka dan digarap oleh yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan terdapatnya dua pola yang dipakai dalam perihal pelepasan tanah ulayat kepada pihak yang membutuhkannya. Kedua pola tersebut adalah :

1. Mengikuti ketentuan hukum agraria nasional.
2. Cendrung mengikuti ketentuan hukum adat.

Uraian berikut menjelaskan secara rinci tentang masing-masing dari kedua pola diatas.

I. Pola yang mengikuti ketentuan hukum agraria nasional.

Pelepasan tanah ulayat milik persekutuan masyarakat matrilineal yang pada umumnya belum bersertifikat untuk kepentingan perusahaan besar perkebunan sawit baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, diperoleh badan usaha ini dengan melalui pembebasan tanah. Pembebasan tanah ini sesuai dengan surat edaran kepala Badan Pertanahan Nasional No.580.2.5568.D III/ 89 menyatakan bahwa :

- a. Pada azasnya pembebasan tanah untuk keperluan swasta dilakukan secara langsung oleh perusahaan swasta yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berhak, atas dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- b. Pembebasan tanah oleh swasta merupakan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan, dan peran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian.

c. Berdasarkan Permendagri No. 5/1974, Permendagri No. 15/1975, Permendagri No.3/1987 dan keputusan BPN No. 19/1989 ditetapkan bahwa pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan oleh Bupati/Wali kotamadya dibantu oleh segenap instansi terkait dalam rangka koordinasi.⁶⁰

Pelepasan tanah ulayat melalui cara pembebasan tanah bersifat keperdataan ini berpedoman kepada beberapa peraturan yang berlaku, diantaranya adalah :

1. Undang undang No.5/ 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
2. PP No.10/ 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11/1962 jis No.2/ 1964 dan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 2/pert/op/8/1969-8/1969 tentang keputusan dan syarat-syarat pemberian HGU kepada pengusaha swasta nasional .
4. Permendagri No. 5/1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan .
5. Keppres No. 23/1980 tentang pemanfaatan tanah HGU dan HGB untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing .

⁶⁰. Lihat juga penjelasan tentang ini pada AP. Parlindungan, *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 23.

6. Peraturan Kepala BPB No. 3/ 1992 tentang tatacara bagi perusahaan untuk memperoleh pencadangan tanah, izin lokasi, pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah serta penerbitan sertifikatnya.
7. Keppres No.34/ 1992 tentang pemanfaatan tanah HGU dan HGB untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing .
8. Keppres No. 97/ 1993 tentang tatacara penanaman modal .
9. Peraturan Menteri Negara Agraria No.2/1993 tentang tatacara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
10. PP No. 20/1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing .
11. PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai bagi penanaman modal asing.
12. Perda No. 13/1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Tk. I Sumatera Barat.
13. SK. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera barat No. 102/GSB/ 1985 tentang pemanfaatan harta kekayaan Nagari dalam Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat.
14. SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat No. 13/1990 tentang susunan organisasi dan tatakerja BKPMID Tk. I Sumatera Barat.

Berbeda dengan pembebasan tanah bersifat publik untuk kepentingan umum yang mengenal pembebasan tanah bersifat mendesak, maka pada pembebasan tanah untuk pengadaan usaha perkebunan sawit bagi kepentingan perusahaan perusahaan perkebunan tidak mengenal hal yang demikian.

Pembebasan tanah ulayat pada pola pertama ini dilakukan dengan mengisi formulir formulir yang sudah baku dan mengikuti proses sebagai berikut :

a. Pengurusan surat izin lokasi.

Perusahan harus lebih dahulu memperoleh surat izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan setempat. Surat izin lokasi yang seringkali diidentikkan secara keliru dengan hak atas tanah, sebenarnya hanyalah suatu surat izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah (TRW), yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Jadi izin lokasi sama sekali bukanlah hak atas tanah danm tidak dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan.

Surat permohonan izin lokasi yang ditujukan kepada kepala Kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat memuat tentang identitas perusahaan pemohon dan identitas tanah yang diperlukan dengan dilampiri :

1. Akte pendirian perusahaan.
2. Surat keterangan NPWP.

3. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon.
4. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah.
5. Uraian rencana proyek yang akan dibangun .
6. Surat persetujuan BKPM.

Sebelum keluarnya peraturan kepala BPN No.2 /1993 disamping surat izin lokasi ini dikenal pula surat pencadangan tanah yang juga dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional.

b. Pengurusan pelepasan hak.

Menurut ketentuan lampiran II Peraturan Menteri Agraria No. 2/1993 disyaratkan kepada pemegang izin lokasi bahwa pengurusan perolehan tanah dari pemilik harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 24 bulan sejak dikeluarkan izin lokasi dengan cara pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Pembayaran ganti rugi yang telah disepakati juga tidak dibenarkan melalui perantara.

Dari ketentuan ini tampak bahwa semangat perundang-undangan menghendaki timbulnya kesepakatan dari kedua belah pihak berasal dari musyawarah yang bebas dari pengaruh pihak lain, tanpa ada intrik dan intimidasi. Kemudian baru dibuatkan akte pelepasan hak dari PPAT setempat.

Menurut ketentuan lampiran II PMA No. 2/1993 diatas dan dicantumkan juga dalam persyaratan pemberian izin lokasi ditetapkan adanya pengawasan terhadap adu kepentingan antara pemilik tanah dengan pengusaha termasuk dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi, untuk pengawasan mana ditugaskan kepada Kakanwil BPN Propinsi dengan keharusan melaporkan hasil hasilnya kepada gubernur kepala daerah dan menteri agraria. Untuk kepentingan ini serta dalam rangka koordinasi seperti yang dikehendaki PP No.6/1988, maka pada setiap daerah tingkat II dibentuk tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah dengan susunan anggota sebagai berikut.⁶¹

- Kepala kantor pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat (ketua merangkap anggota).
- Kepala seksi pada kantor pertanahan setempat (sekretaris).
- Kepala bagian pemerintahan pada sekretaris wilayah daerah tingkat II (anggota).
- Kepala Dinas Pekerjaan umum (anggota).
- Kepala Dinas Tata kota dan atau Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan/Perkebunan daerah tingkat II (anggota).
- Kepala kecamatan setempat (anggota).

61. Lihat juga tentang susunan kepanitiaan ini pada buku AP. Parlindungan, *Op cit*, hal. 23.

Tugas utama dari Tim pengawasan dan pengendalian ini tak lain dari selaku mediator terhadap kepentingan kedua belah pihak dan sekaligus ikut menyaksikan pembayaran atas segala ganti rugi yang telah disepakati kepada pemilik tanah semula.

Dalam penelitian terungkap fakta bahwa sebelum musyawarah formal untuk pelepasan tanah ulayat dilakukan di kantor KAN, pihak mediator dari aparat Pemda Tingkat II dan Kecamatan telah lebih dulu melakukan pendekatan-pendekatan informal terhadap Ketua KAN, dalam pendekatan mana menurut Abu Bakar Mangkuto Alam selaku *orang tuo* adat di Kinali selalu disertai ancaman-ancaman antara lain dikategorikan sebagai warga penghambat pembangunan serta rayuan-rayuan finansial. Ketua KAN yang berada dalam posisi yang menyulitkan dipaksa untuk mengikuti kehendak pengusaha dan penguasa kepada warga anggota pemilik.

Kemudian diadakan musyawarah pelepasan hak ulayat di Kantor KAN, yang hanya dihadiri *ninik mamak* tanpa turut serta kaum wanita dan para kemenakan, serta mediator lengkap dengan atribu kekuasaannya dan wakil dari pengusaha. Selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam surat pernyataan penyerahan hak ulayat dari *ninik mamak* kepada pemerintah. Surat tersebut lazimnya memuat :

1. Identitas kedua belah pihak (pemilik dan bupati selaku wakil pemerintah penerima penyerahan hak ulayat).
2. Identitas obyek,

3. Pernyataan penyerahan dari pemilik,
4. Pernyataan penerimaan dari bupati,
5. Keharusan *adat diisi limbago dituang*,
6. Tandatangan kedua belah pihak.

Format surat penyerahan tanah ulayat ini selanjutnya dapat dilihat dalam lampiran I.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan tentang kesepakatan antara ninik mamak dengan pengusaha, yang lazimnya memuat:

1. Identitas kedua belah pihak,
2. Pernyataan penyerahan tanah ulayat untuk diolah,
3. Prosentase pembagian lahan inti dengan plasma,
4. Jumlah uang *silih jariah* dan ketentuan ganti rugi lainnya yang tidak begitu rinci,
5. Tandatangan kedua belah pihak

Format surat kesepakatan tanah ulayat ini selanjutnya dapat dilihat dalam lampiran II.

Surat penyerahan tanah ulayat maupun surat kesepakatan dengan pengusaha yang tidak memuat kewajiban pengusaha secara rinci oleh seluruh responden dianggap sudah cukup karena aspek kepercayaan dianggap lebih penting dari sekadar surat. Surat itu hanyalah sebagai simbol dari pemberian kepercayaan itu dan dalam kepercayaan itulah menurut mereka tersurat segala kewajiban-kewajiban yang perlu dijalankan masing-masing pihak.

c. Pengajuan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Propinsi.

Untuk memperoleh HGU haruslah berdasar penetapan pejabat berwenang yang dalam hal ini menurut ketentuan pasal 31 UUPA jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1993 adalah kepala kantor wilayah BPN untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha dan menteri negara agraria untuk luas tanah yang melebihi itu.

Sebelum keluarnya peraturan Menteri Negara Agraria/Kep. BPN No.2/1993, wewenang untuk pemberian hak atas tanah inisemula dilimpahkan kepada gubernur kepala daerah melalui permendagri No. 6/1967 untuk luas HGU maksimal 25 Ha, sedangkan untuk luas yang melebihi itu tetap berada di tangan menteri terkait.

Tidak satupun penetapan pemberian HGU atas tanah ulayat di lokasi penelitian berasal dari gubernur kepala daerah, lantaran disamping luasnya yang diatas maksimal kewenangan gubernur, juga proses pengurusan hak itu justru banyak berlangsung sesudah tahun 1993, sekalipun perusahaan telah melakukan operasi jauh sebelum HGU dikeluarkan. Hanya ada satu perusahaan yakni PT. Trisanggaguna yang pengajuan HGU nya dilakukan sebelum tahun 1993 dengan luas lokasi 7000 Ha. Selainnya diproses berdasar ketentuan peraturan Menteri negara Agraria No. 2/1993 diatas yang sampai saat ini masih belum turun. Artinya sertifikat HGU belum

nyata nyata keluar ,sementara lahan untuk perkebunan telah lama dikuasai dan diolah.

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria diatas, pengajuan permohonan HGU kepada Kakanwil BPN setempat haruslah dilampiri :

1. Izin lokasi.
2. Bukti bukti perolehan tanah.
3. Jati diri pemohon/akte pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.
4. Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.
5. Gambar situasi hasil pengukuran kadasteral oleh kantor pertanahan setempat.

Dalam praktek, pelepasan tanah ulayat dalam pola pertama ini, ternyata tidak sesederhana itu. Terdapat persyaratan lain yang menurut BPN setempat harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan HGU, diantaranya ialah :

- a. Referensi Bank.
- b. Proposal/rencana kerja.
- c. Bukti tersedianya tenaga ahli yang berpengalaman
- d. Riwayat badan hukum.

- e. Surat keterangan dari Kantor sospel mengenai Dewan Komisaris dan direksi.
- f. Rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- g. Persetujuan prinsip dari menteri yang bersangkutan.
- h. Surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN dan surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA.
- i. Pembayaran biaya untuk pengukuran topografi dan pemetaan, pengukuran kadasteral dan biaya untuk pemeriksaan tanah oleh panitia pembebasan tanah.

Setelah semua ini di proses tidak ada jaminan bahwa pengajuan HGU lantas akan dikabulkan, sebab Kakanwil BPN maupun Menteri terkait berwenang menolaknya.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa pengajuan HGU ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi, namun sampai saat penelitian dilakukan di Kanwil BPN tersebut, ternyata dari delapan perusahaan yang beroperasi di lokasi penelitian baru satu perusahaan yang mengajukan permohonan HGU yakni PT. Tri Sanggaguna, padahal diantara perusahaan tersebut banyak yang telah lama berproduksi. Bapak Andi selaku informan di kantor tersebut tidak dapat menjelaskan kendala-kendala apa yang jadi penyebab keterlambatan pengurusan HGU ini sembari ikut pula mempertanyakan kemauan dan itikad baik pengusaha.

Disamping beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengurusan administratif seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa lembaga pemerintahan lain yang ikut menangani urusan perkebunan sawit antara lain Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Kanwil Pertanian, Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II dan Aparat Kecamatan serta BKPMMD.

II. Kecendrungan mengikuti ketentuan hukum adat.

Pola pelepasan tanah ulayat yang cenderung mengikuti ketentuan hukum adat ternyata masih hidup dan berlangsung di daerah ini, tetapi lebih banyak tertuju untuk usaha perkebunan perseorangan/pribadi diatas tanah yang semula berupa ulayat kaum melalui jual beli hak atas tanah.

Disebut "kecendrungan" karena pada azasnya hukum adat tidak mengenal terjadinya jual beli/pelepasan hak atas tanah, kecuali dengan syarat syarat yang berat, ternyata hal ini dilakukan sekalipun kriteria persyaratan persyaratan berat itu belum terpenuhi.

Tanah ulayat kaum yang pada umumnya tidak mempunyai anggota pemilik yang berjumlah banyak, membuat pembeli tidak khawatir akan resiko gugatan dibelakang hari asal saja disetujui seluruh anggota pemilik. Jual beli hak atas tanah ini dilakukan secara tunai dan terang. Berbeda dengan istilah uang ganti rugi semacam "silih jariah" yang dikenal pada pola pertama, maka uang yang diterima sebagai akibat pelepasan tanah ulayat pada jenis kedua ini diakui sebagai uang yang diterima akibat transaksi jual beli hak atas tanah yang pada

umumnya cukup dilakukan diatas kertas segel, ditanda tangani kedua belah pihak, disertakan tanda tangan batas sepadan sebagai saksi saksi dan Pucuk nagari.

4. Pengaruh Kebijakan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Matrilineal

Semenjak terjadinya banyak peralihan hak ulayat persekutuan matrilineal kedalam tangan pengusaha untuk diolah jadi lahan perkebunan sawit, ternyata volume interaksi sosial dalam pola hubungan *mamak-kemenakan* menjadi berkurang. 90% dari responden berupa anak kemenakan mengaku mengurangi volume kunjungan kepada mamak. Menurut mereka hal ini dilakukan karena mamak tidak lagi begitu antusias untuk ikut memikirkan kehidupan ekonomi mereka. Para ninik-mamak hanya sibuk memikirkan kehidupan ekonomi pribadi dan keluarganya. Para responden ini menyebutkan bahwa ninik-mamak telah berubah jadi *ninik-ngangak* (mamak-mamak yang bodoh) dan para ninik-mamak itu menurut mereka telah menganut filosofi "*anak dipangku kemenakan dijinjing (dijewer)*".

90% dari responden yang terdiri dari para kemenakan itu serta 75% responden dari kaum ibu berpendapat bahwa mamak tak dapat lagi diandalkan sebagai sandaran kukuh dalam kehidupan sosial ekonomi mereka.

Terdapat 20 dari 25 orang responden dari golongan ninik-mamak mengakui mengalami penurunan wibawanya dalam pandangan para kemenakan

dibanding masa lalu sebelum adanya pembukaan hak ulayat oleh pengusaha di Pasaman. Mereka mengaku jarang dimintai fatwa-fatwa oleh para kemenakan dan merasa semakin ditinggalkan. Pengakuan seperti ini diantaranya dilontarkan oleh Datuk Sarawi, Abu Bakar Mangkutoalam dan Nazif Datuk. Akibatnya para responden ini mengakui lebih banyak berada dalam lingkungan keluarga istrinya dan jarang melakukan investigasi terhadap kehidupan sosial ekonomi para kemenakannya.

Para ninik-mamak yang membuat persetujuan pelepasan hak-hak ulayat keluar persekutuan, pada umumnya mengakui tidak begitu menghiraukan lagi atas kutukan terhadap adanya sumpah pasatiran, karena disamping mereka kurang mempercayai kekuatan kutukan itu juga merasa tak melakukan pengkhianatan terhadap para kemenakan.

Para responden dari kelompok *tigo tungku sajarangan*, mayoritas berpendapat bahwa kaum wanita dalam anggota persekutuan tidak perlu dilibatkan dalam musyawarah pelepasan hak ulayat. Akibatnya para anggota perempuan dalam clan beserta ana-anaknya tidak dapat ikut mengontrol jumlah keuangan sebagai ganti silih jahiah yang diberikan pengusaha.

77% responden dari kaum ibu dan anak-anaknya dalam clan mamak mengaku tidak mengenyam secuil pun uang silih jahiah yang diterima mamak dan 33% mengaku hanya memperoleh sekadar pembeli bawang-garam. Menurut mereka uang tersebut justru mengalir kedalam kantong segelintir ninik-mamak

dan pada umumnya digunakan untuk membuat rumah mewah bagi istri dan anak-anaknya serta untuk memenuhi pola kehidupan konsumtif.

Abubakar Mangkutoalam selaku orang tuo adat di Kanagarian Kinali menyatakan bahwa uang silih jahiah untuk ganti rugi tanah-tanah ulayat dalam Kanagariannya lebih banyak digunakan secara pribadi oleh ketua KAN setempat. Fakta di lapangan menunjukkan para ketua KAN serta tokoh-tokoh adat yang dekat dengan elit kekuasaan memiliki beberapa rumah yang sangat mewah dilengkapi beberapa kendaraan roda empat yang bila ditakar dengan kondisi setempat terasa sangat mencolok mata.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Pasaman sebagai akibat peralihan tanah ulayat kepada pengusaha, tidak hanya menyangkut sistem kekerabatan dalam pola hubungan mamak-kemenakan, juga merembes pada pemikiran terhadap bidang lainnya. Sebagai contoh adalah tentang alasan-alasan terhadap pelepasan hak ulayat seperti yang telah diuraikan di muka dan juga ditemukannya fakta bahwa proses pelepasan hak ulayat sesuai ketentuan hukum agraria nasional dapat diterima sebagai suatu kewajaran.

70% responden menyatakan bahwa proses pelepasan tanah melalui pembebasan tanah yang bersifat keperdataan sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional dapat diterima asal saja dilakukan secara jujur dan terbuka. Hanya 30% yang menganggap bahwa hal itu dirasakan tidak efektif dan terlalu berbelit serta berpotensi untuk disalahgunakan.

5. Untung Rugi Akibat Penggunaan Tanah Ulayat Oleh Pengusaha terhadap Warga Persekutuan Setempat

Dari segi ekonomi warga persekutuan setempat menerima uang ganti rugi atau silih jahiah atas penggunaan tanah ulayat mereka dari pengusaha dengan jumlah berkisar Rp 25.000 - 30.000 /Ha.

Dalam penelitian terungkap fakta bahwa 77% responden terdiri dari kaum ibu dan para kemenakan yang secara adat berhak pula terhadap uang silih jahiah ternyata tidak mendapatkan haknya, sedangkan 33% memperoleh uang silih jahiah dalam jumlah yang sangat sedikit. Uang silih jahiah itu bermuara kedalam kantong para ninik-mamak terutama ketua KAN dan para mediator.

Seluruh responden mengungkapkan bahwa uang silih jahiah itu bukanlah berarti sebagai nilai intrinsik dari tanah ulayat melainkan sebagai sekadar tanda pengakuan terhadap hak ulayat mereka untuk digarap oleh pengusaha dengan memakai prinsip-prinsip kekeluargaan. Jadi ada nilai kebersamaan dalam silih jahiah itu yang oleh pengusaha harus dihormati dengan menenggang hak-hak mereka.

Abu Bakar Mangkutoalam selaku orang tuo adat Kanagarian Kinali dan salah seorang pengurus KAN, mengakui bahwa ia dan para ninik-mamak lainnya menerima jatah penggantian tanah ulayat berupa uang silih jahiah itu dalam jumlah yang sedikit, sedang bagian terbesar bermuara pada ketua KAN

dan para mediator. Ketua KAN Kinali, Zainal Basri Yang Dipertuan bahkan mengakui pula bagian terbesar dari jumlah itu "*disunat*" oleh para mediator.

Dari fakta ini terungkap bahwa justru bagian terbesar dari uang silih jahiah itu tidak dinikmati oleh warga persekutuan, sementara di pihak lain tidak sedikit lahan-lahan garapan yang telah mereka olah sejak semula dilibas oleh pengusaha karena dianggap berada dalam lahan pencadangan tanah untuk perkebunan mereka. Abu Bakar Mangkutoalam menyebutkan satu contoh peristiwa tragis yang dialami warga pembuka lahan di atas tanah ulayat yang hampir panen padi di sawah, seketika ditimbun oleh pengusaha. Tragisnya pemilik lahan langsung meninggal di tempat lantaran mengalami *shock* berat.

Dalam kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara pemilik tanah ulayat dengan pengusaha dicantumkan, pada perkebunan pola PIR ini pembagian inti dan lahan plasma untuk warga sekitar 70 : 30 atau 60 : 40. Ternyata seluruh lahan plasma yang dijanjikan itu belum pernah hasilnya diterima oleh warga sekalipun sawit sudah bertahun-tahun berproduksi.

Menurut Maslan, salah seorang mantan karyawan PT. AMP, pengunduran jadwal penyerahan plasma yang berlarut-larut itu disebabkan beberapa hal:

1. Belum tersedianya lahan plasma yang cukup untuk itu,
2. Pengajuan nama-nama anggota pemilik plasma yang berhak melampaui kapasitas,

3. Belum tuntasnya segala persyaratan administrasi yang diperlukan untuk itu, antara lain sertifikasi lahan yang tidak kunjung dilakukan oleh BPN.

Namun Maslan mengakui hampir Rp. 140 juta tiap bulan Pt tersebut mengeluarkan uang yang diambilkan dari hasil plasma untuk disetor ke rekening pribadi Bupati Kabupaten Agam (sebagian ulayat Kanagarian Kinali secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Agam).

Bila pun lahan plasma dibagikan pihak yang akan banyak mereguk keuntungan adalah para petani berdasi yang datang dari kota dan para mediator lantaran sebelumnya telah diaku oleh sebagian ninik-mamak sebagai kemenakan setelah membayar sejumlah uang untuk itu.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan hampir 2/3 dari jatah lahan plasma yang semestinya untuk warga setempat, telah dijual lebih dulu oleh para ninik-mamak dengan nilai sekitar Rp. 2 Juta per kapling kepada orang luar persekutuan. Contoh surat perjanjian penjualan ini kepada pihak luar selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran III.

Zainal Basri Yang Dipertuan selaku ketua KAN Kinali, Abu Bakar Mangkutoalam mengakui hal-hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan administratif, antara lain beliau menunjuk kepada biaya-biaya sertifikasi.

Disamping jalur transportasi yang semakin lancar ke arena lokasi penelitian dibanding sebelum adanya pembukaan lahan sawit, terdapat

keuntungan lain bagi warga, yakni tertampungnya sekitar 2000 orang buruh tani kedalam usaha perkebunan. Banyak para pendatang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya khususnya dari Batak dan Jawa yang mencoba mengadu untung di sini, sehingga kota kecil Simpang Empat sebagai pusat Kecamatan Pasaman dan Kinali menjadi lebih ramai dan berdenyut.

Nazif Datuk seorang pemuka masyarakat Simpang Empat menyebutkan bahwa kotanya jauh lebih ramai dan hidup dibanding sebelum terbukanya lahan-lahan perkebunan sawit, namun sayangnya menurut beliau kegairahan wilayah itu hanya dipicu dan dinikmati oleh orang-orang luar wilayahnya yang sukses mengeruk untung di situ dan mereka sukses dalam anggota Perkebunan Ophir, sementara mayoritas warga setempat hanyalah sebagai penonton. Beliau mengakui juga bahwa ada sedikit keuntungan yang dapat dinikmati warga, yakni keberadaan pabrik pengolahan minyak sawit di daerahnya yang semula dibuat pengusaha dengan maksud menampung hasil perkebunan sawit ternyata sekaligus dapat menampung buah tandan segar sawit penduduk setempat sekalipun dalam jumlah relatif kecil. Menurut Nazif Datuk menipisnya hak ulayat ikut merusak tatanan struktur masyarakat adat matrilineal. Itu ditandai dengan makin menipisnya pula hubungan mamak dan kemenakan. Perubahan sosial yang terurai dalam pernyataan terdahulu adalah bukti-bukti yang tak terelakkan yang menurutnya adalah suatu kerugian tak terbantahkan.

B. Analisis

1. Analisis Terhadap Alasan-alasan Peralihan Hak Ulayat

Bila menilik kedalam ketentuan adat Minangkabau, maka pelepasan hak ulayat itu sangat dipersulit dan nyaris tidak dimungkinkan, kecuali dalam hal yang sangat darurat sifatnya seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. *Mayik tabujua tengah rumah* (Mayat terbujur ditengah rumah)
2. *Rumah gadang ketirisan* (Rumah Gadang ketirisan).
3. *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa tidak bersuami)
4. *Membangik batang tarandam* (membangkik batang terendam = untuk menegakkan kembali pusaka adat)⁶²

Kiranya tak satupun rumusan di atas yang dapat digunakan sebagai alasan tepat ataupun dalih untuk melepaskan hak ulayat kepada pengusaha pekerbunan dalam situasi terakhir ini, mengingat tak satu satupun muncul fenomena yang dapat ditarik dan dimuat kedalam salah satu rumusan di atas.

Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat matrilineal dilokasi penelitian bersedia melepaskan tanah ulayat mereka kepada pengusaha perkebunan. Bila dipilah, alasan tersebut mencakup 2 faktor :

62. Lihat Juga Chairil Anwar, *Op cit*, hal. 95 dan Dt. B. Nurdin Yakub Buku ke-III, *Op cit*, hal. 23.

1. Faktor Internal , meliputi :

a. Alasan Ekonomis.

Keadaan perekonomianlah yang menyebabkan anggota persekutuan pemilik tanah ulayat setempat bersedia memeralihkan tanah ulayat mereka kepada pengusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada mulanya tingkat perekonomian masyarakat setempat tidaklah begitu buruk dan mengkhawatirkan. Tingkat persaingan hidup yang tidak begitu tajam dalam persedian tanah pertanian subur yang sebetulnya terbentang amat luas dibanding dengan jumlah penduduk yang sebenar tidak seberapa tidak membuat masyarakat setempat sampai kekurangan pangan seperti halnya yang pernah mereka alami dizaman penjajahan Belanda. Namun realita hidup modern yang cenderung menjebak manusia kedalam pola hidup konsumtif dengan takaran yang serba material membuat masyarakat tidak saja awam bahkan sebagian masyarakat terdidik tetap merasa kekurangan. Serba kebendaan yang ditawarkan oleh lingkungan kekinian itulah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak begitu hirau dengan kebutuhan sekian generasi mendatang, lantas memeralihkan hak ulayat yang diperkirakan membawa keuntungan ekonomi tidak sedikit dalam ukuran mereka, baik itu karena penggantian uang *silih jahiah* dari tanah ulayat ataupun dari hasil kebun plasma.

b. Alasan yang lebih bersifat religius.

Hasil penelitian juga menemukan, sebagian masyarakat memandang bahwa pemberian hak ulayat untuk dipersiapkan untuk anak kemenakan dimasa datang, tanpa dimanfaatkan sejak dini adalah suatu perbuatan mubazir dan kesia-siaan. Tuhanpun sangat membenci perbuatan mubazir yang menurut mereka dapat dikenakan terhadap pemberian hak ulayat ini. Bila tak sanggup melakukan pengolahan entah karena kekurangan tenaga dan biaya maka tak ada salahnya diperalihkan kepada pihak lain yang sanggup untuk itu dengan perolehan imbalan tertentu. Alasan diatas ini menampakkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama ini kukuh dianut warga persekutuan setempat.

b. Penafsiran yang beragam terhadap pelepasan hak ulayat.

Tidak semua anggota persekutuan pemilik hak ulayat, terutama pada ninik mamak mempunyai persepsi yang sama terhadap pelepasan/pembebasan tanah ulayat mereka. Tidak sedikit diantara menafsirkan penggunaan tanah ulayat oleh pengusaha bukanlah berarti melepaskan hak kepemilikan yang ada pada kelompok persekutuan mereka, dan mereka tetap berpijak pada filosofi adat : "*Kabau tagak kubangan tingga*" (Kerbau berdiri kubangan tinggal). Artinya sesuai penggunaan tanah ulayat oleh pengusaha atau katakanlah sehabis usia HGU yang dipegangnya, baik melalui perpanjangan waktu atau tidak,

maka tanah ulayat kembali kedalam pemilikan mereka. Ibarat seekor kerbau yang bila selesai berkubang, pergi tanpa membawa kubangnya.

Sebagian yang lain dan ini merupakan golongan minoritas berpendapat bahwa peralihan hak itu berarti memutuskan hubungan hukum antara mereka dengan tanahnya semula, khususnya terhadap tanah-tanah yang dijadikan perkebunan inti. Sedang terhadap tanah-tanah dalam perkebunan plasma jatuh menjadi milik perorangan. Dalam pandangan ini terdapat kesadaran yang penuh bahwa dengan penggunaan tanah ulayat mereka oleh pengusaha berarti telah melepaskan kepemilikan tanah ulayat itu untuk selamanya, bukan sekadar semacam hak pakai dalam batas waktu tertentu.

Terutama penafsiran dari golongan pertama, mendorong terjadinya peralihan hak ulayat keluar anggota persekutuan untuk dikelola menjadi lahan perkebunan.

2. Faktor Eksternal, meliputi :

a. Adanya tekanan dari pemegang kekuasaan

Pembangunan yang sangat semarak dizaman Orde Baru dan berorientasi pada angka-angka pertumbuhan ekonomi, terkadang tidak begitu memperdulikan cara-cara yang harus ditempuh dalam mengejar target. Terdapat satu senjata pamungkas yang dapat membuat bulu kuduk berdiri bila tidak menyetujui program pembangunan yang telah

dicanangkan, yakni tudingan sebagai penghambat pembangunan. Itu artinya "Sipenghambat" dikategorikan sebagai anggota dari partai terlarang, sehingga sewaktu-waktu dapat diamankan. Selanjutnya persoalannya akan jadi berbelit dan dapat memperangkap yang bersangkutan dalam rekayasa politis yang benar-benar tak dapat ia cerna.

Tidak sedikit pemilik hak ulayat yang mencoba mempertahankan keutuhan haknya, mendapat tekanan bahkan ancaman dari pihak aparat ataupun orang-orang tak dikenal agar yang bersangkutan mematuhi/memufakati saja apa yang telah diprogramkan. Toch, bila penguasa punya kemauan dan memberi jalan kepada pengusaha maka tak seorangpun rakyat yang dapat merintanginya. Tekanan-tekanan seperti ini membuat pembakang-pembakang terhadap berpindahnya hak ulayat kembali pasrah.

b. Trauma psikis oleh luka sejarah.

Sewaktu perkebunan ophir dicanangkan Belanda, pada hakikatnya terjadi penindasan terhadap hak-hak persekutuan yang memiliki tanah ulayat diwilayah ophir. Tak hanya itu, pemegang kekuasaan saat itu tak henti-hentinya menguras tenaga rakyat yang dipekerjakan disitu. Penguasa sudah terbentuk sebagai simbol yang menakutkan dan mempunyai kekuatan yang tidak mungkin dilawan.

Pada waktu perkebunan kembali dibuka di era Orba dengan memakai pula nama Kebun Ophir, luka sejarah itu seolah kembali menganga, dan menimbulkan trauma tersendiri sehingga tak heran bila pada awalnya banyak mereka yang menolak untuk dikutsertakan sebagai anggota plasma pada perkebunan sawit. Mereka hanya mencari selamat dari sikap penguasa yang dianggap masih haus darah rakyat. Cara terbaik adalah diam dan menyetujui secara lahiriah atas program pemerintahan, termasuk dalam peralihan hak ulayat.

Bila diperhatikan semua alasan di atas yang ternyata jauh lebih longgar dibanding dengan nilai-nilai adat yang selama ini dianut untuk dalih pembenaran dalam peralihan hak ulayat, maka tampak jelas terjadi pergeseran nilai-nilai yang dianut selama ini kepada nilai-nilai baru, nilai-nilai mana justru akibat adanya kebijakan penggunaan hak ulayat. UUPA dengan segala peraturan yang menjabarkannya berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum lebih dulu berjalan di depan mendahului mores.

Hilangnya rasa ketakutan akan akibat pelanggaran terhadap *sumpah pasatiran*, agaknya dapat dipandang dari teori rasionalitas Weber yang menganggap bila kekuasaan politik yang menjalankan pemerintahan kian rasional maka proses hukum dalam masyarakat pun akan dijalankan secara rasional pula. Keseluruhan bidang hukum akan mengalami rasionalisasi. Sukar memang untuk secara rasional mencari benang merah antara

kemelaratan hidup yang diderita seorang ninik-mamak dengan tindakannya yang melakukan peralihan hak ulayat.

Realita sosial dalam masyarakat matrilineal, khususnya dalam pelepasan hak ulayat pada beberapa sisi ternyata membalikkan teori Weber, terutama dalam kaitan perkembangan hukum sebagai respon dari tuntutan ekonomi. Ternyata dalam penelitian ditemukan bahwa tuntutan ekonomi ikut menentukan perkembangan hukum.

Teori Marx yang menolak pandangan bahwa agama dapat mempengaruhi perubahan sosial ternyata juga terpisah oleh realitas sosial dalam masyarakat matrilineal. Agama (khususnya Islam) ternyata berperan merubah sikap warga dalam memandang peralihan hak ulayat. Pandangan Marx barangkali bisa menjadi benar kalau berpijak dari pola pikir sekuler, namun Islam yang kosmopolitan bila dipahami lebih mendalam seperti yang dilakukan dalam masyarakat matrilineal, membuat mereka justru berupaya melakukan perubahan-perubahan kearah tuntutan kemauan agama, sekalipun yang dilakukan itu belum tentu pas. Sayangnya Marx belum bersentuhan dengan masyarakat matrilineal yang justru punya kebanggaan religius dengan filosofi: *"Adat bersendi syarak, Syarak bersendi kitabullah, Apa kata syarak terpakai dalam adat"*.

Berangkat dari paradigma fakta sosial, khususnya kaitannya dengan teori fungsionalisme struktural, tampak pula upaya untuk menjaga keserasian

antara pranata sosial kekerabatan matrilineal dengan pranata pemerintahan yang ada, yang pada ujung-ujungnya justru menimbulkan perubahan sosial. Paling tidak dipertunjukkan dalam bentuk tidak melakukan konflik terhadap tekanan kekuasaan. Sistem kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan mamak-kemenakan justru dibiarkan mendangkal untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang lebih besar dan lambat laun dapat pula tumbuh jadi mores.

Masyarakat memerlukan kedamaian. Negara berkewajiban memakmurkan seluruh warganya, sebab itu tidak saatnya lagi melakukan pendekatan-pendekatan kekuasaan, apalagi kalau itu ditujukan pula kepentingan pribadi. Pendekatan-pendekatan yang lebih rasional akan membuka mata warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan dengan perlahan-lahan akan merombak struktur-struktur yang menjadi penghambat. Dan yang lebih baik adalah hukum itu justru bertolak dari nilai mores masyarakat setempat, jika ternyata nilai-nilai mores itu terbukti lebih mampu menjembatani ketimpangan-ketimpangan sosial yang justru akhir-akhir ini semakin diributkan.

2. Analisis terhadap Pola Pelepasan Hak Ulayat

Pola pelepasan tanah ulayat seperti diuraikan di muka cenderung mengacu kepada dua sistem hukum, yakni hukum agraria nasional dan ketentuan-ketentuan hukum adat. Jadi ada semacam dualisme hukum. Sistem manapun yang ditempuh diantara keduanya selalu lebih dulu ditempuh jalan musyawarah untuk memepertemukan kehendak kedua belah pihak.

Dalam pelepasan tanah ulayat di Pasaman tidak selamanya musyawarah yang diadakan untuk kepentingan demikian dapat dilakukan secara merdeka bagi kedua pihak, khususnya terhadap pemilik tanah, sebab sekalipun telah ditetapkan bahwa pembebasan tanah melalui pelepasan tanah demikian ini adalah merupakan pembebasan yang murni bersifat keperdataan, namun tak jarang dilakukan pendekatan kekuasaan, bahkan dengan memakai atribut atribut tertentu yang membuat pemilik kehilangan kebebasannya. Yang penting dari pendekatan kekuasaan seperti ini adalah lahirnya surat pernyataan pelepasan dari pemilik semula selanjutnya segera dibawa ke PPAT khusus (deputi IV bidang pengukuran dan pendaftaran tanah BPN) untuk dibuatkan akta pelepasan haknya. Tidak adanya batasan tugas yang rinci dari tim pengawasan dan pengendalian pembebasan ini justru membuat aspek "pengendalian" menjadi lebih mengemuka sehingga melampaui batas batas yang sebenarnya hanya berkisar sekitar tugas kemediatoran. Akibatnya tidak selamanya pembayaran ganti rugi terhadap pelepasan tanah ulayat telah tuntas sebelum proses pengajuan HGU dilangsungkan. Banyak diantaranya pengajuan permintaan HGU telah diproses, sementara masalah pembayaran ganti rugi masih terhadang berbagai kendala

Dahulu, lazimnya dalam musyawarah pelepasan tanah, ninik mamak pemangku adat harus minta persetujuan secara terbuka kepada anak kemenakan (termasuk kaum wanita) masing masing, untuk selanjutnya

dibawa kedalam musyawarah adat di tingkat kanagarian bertempat di Balai adat/Kantor KAN

Dari hasil penelitian terlihat, tidak banyak anak kemenakan apalagi kaum ibu yang sebenarnya amat berkepentingan terhadap hak ulayat, dimintai persetujuannya untuk pelepasan hak ulayat ini. Pendekatan kekuasaan yang diarahkan kepada ninik mamak serta umpan umpan /keuntungan keuntungan yang dijulurkan dibalik pelepasan hak ulayat, membuat ninik mamak juga melakukan tindakan yang tidak transparan terhadap anak kemenakan yang masa depannya ikut dipertaruhkan diatas tanah ulayat. Bahkan uang ganti rugi atas tanah yang disebut "uang silih jahiah" dari calon investor kepada ninik mamak banyak yang tidak sampai kepada mereka. Disamping hanya mengalir kedalam kantong ninik mamak, juga bermuara kepada genggaman elit penguasa yang sebenarnya cuma berfungsi selaku mediator.

Target pertama pengusaha dalam rangka memperoleh lahan adalah secepatnya memperoleh surat pernyataan penyerahan hak ulayat dari ninik-mamak dengan menomorduakan persyaratan-persyaratan administratif lainnya.

Bila disimak, surat pernyataan penyerahan hak tersebut ataupun surat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat untuk itu terdapat pengaturan yang sungguh tidak *balance* dan sangat kabur. Sama sekali mengabaikan hak-hak warga persekutuan. Materi perjanjian lebih banyak menekankan kewajiban-kewajiban pemilik semula tanpa secara rinci menyebut kewajiban-kewajiban

pengusaha. Akibatnya tercipta celah-celah pada cela mana pengusaha dan bahkan penguasa dapat berkelit untuk belum atau tidak menuntaskan kewajibannya dalam memulihkan hak-hak warga, padahal ini menyangkut jumlah finansial yang tidak sedikit. Pada celah ini pula kolusi, korupsi dan nepotisme gampang menyembul.

Berangkat dari teori interaksionisme simbolik, ternyata tindakan ninik-mamak menandatangani perjanjian pelepasan hak ataupun tanda tangan mereka diatas surat kesepakatan dengan pengusaha oleh warga diartikan sebagai "*ada hitam diateh putih* (sekadar surat bukti untuk kewenangan menggunakan tanah ulayat)" dan didalamnya tersirat unsur lain yang lebih penting yakni untuk menjaga saling kepercayaan. Bagi warga, penjabaran yang terlalu mendetail dalam surat kesepakatan apalagi menyangkut kebendaan terasa tabu untuk diungkap dan dianggap materialistik. Jadi surat-surat kesepakatan penyerahan hak ulayat itu merupakan suatu simbol dan haruslah dibaca sebagai suatu surat yang memuat kewajiban-kewajiban pengusaha secara rinci terhadap warga tanpa menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Pengusaha semestinya arif dan mampu membaca simbol-simbol itu secara tepat, bukannya memanfaatkan celah-celah yang ada untuk merekayasa kejadian buat keuntungan diri sendiri. Tidak semua pengusaha dan penguasa mampu arif dan mampu menangkap simbol maka untuk menjaga agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan sepatutnyalah dalam surat pernyataan/surat kesepakatan atau apapun namanya dicantumkan secara jelas hak-hak warga pemilik, khususnya tentang:

- jaminan yang pasti terhadap pemilik lahan garapan yang ada di atas tanah yang akan diserahkan,
- luas lahan plasma,
- jadwal paling lambat penyerahan plasma,
- jaminan bahwa plasma diletakkan pada tanah yang subur,
- jaminan bahwa plasma juga dipelihara baik,
- sanksi-sanksi yang tegas bila perusahaan menyalahi kesepakatan.

Hal-hal penting demikian ini justru diabaikan dalam pokok perjanjian, sehingga pengusaha yang tidak punya itikad baik dengan mudah melakukan penyimpangan-penyimpangan, antara lain dengan menunda-nunda penanaman plasma atau dengan meletakkan pada lahan yang tidak produktif.

Dibalik penundaan pengajuan HGU oleh pengusaha, sementara perusahaan telah lama berproduksi jelas mengundang keraguan terhadap itikad baik pengusaha, sebab secara formal mereka dapat membuktikan bahwa penanaman baru dilakukan setelah HGU turun, dan untuk membuktikan kebenaran material pejabat mana yang mau masuk ke hutan pedalaman tanpa pamrih dan tanpa tergoda rayuan finansial investor?. Padahal penundaan seperti itu tidak saja merugikan warga pemilik, juga negara lantaran kehilangan penerimaan dari pajak-pajak, tetapi menguntungkan bagi pejabat-pejabat yang bermoral gampang disuap. Sejalan dengan hal di atas, Solly Lubis mengatakan:

Seharusnya politik pertanahan berpihak kepada rakyat sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Sudah saatnya kebijakan pertanahan dikaji ulang, apakah benar-benar sudah mengacu kepada pasal 33 UUD 1945. Selain itu perlu dikaji apakah pelaksanaannya sudah sesuai.⁶⁸

Pola pelepasan tanah ulayat yang mulai bergeser kearah pola kebijakan yang diinginkan pemerintah, membuktikan pula bahwa hukum itu khususnya UUPA dan seperangkat peraturan pelaksanaannya berperan sebagai sarana rekayasa sosial.

Perubahan yang diinginkan itu bisa pula menjadi sumber konflik, bila hukum itu tidak mengatur dan tidak siap mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ditimbulkannya. Contoh yang sangat mungkin menjadi sumber kerawanan itu nanti adalah tidak adanya kepastian yang tegas mengenai status hak ulayat sesuai dipergunakan oleh pengusaha. Hal ini hendaknya mulai dipikirkan sejak dini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas, sehingga pemilik hak ulayat sejak jauh hari dapat menentukan sikap dan bekas-bekas tanah perkebunan di atas tanah ulayat tidak menjadi ajang rebutan antara persekutuan dengan pemerintah maupun sesama anggota persekutuan.

⁶⁸ Solly Lubis, Kompas, 24 September 1993, hal.9.

3. Analisis terhadap Pengaruh Kebijakan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Sosial

Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik secara cepat ataupun lambat, perubahan mana menyangkut berbagai bidang kehidupan tak terkecuali masyarakat dalam persekutuan matrilineal.

Sekalipun ada slogan "*adat nan ndak lakang dek paneh, nan ndak lapuak dek hujan*"⁶⁴ (yang digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai adat matrilineal), namun dalam perkembangan interaksi berikutnya yang semakin luas dan kompleks, imbas perubahan itu tak dapat dicegah entah karena digerakkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Demikian pula realitas sosial yang muncul dalam masyarakat di Pasaman. Kebijakan penggunaan terhadap tanah ulayat untuk usaha usaha perkebunan baik yang dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri, PMA, maupun usaha perkebunan perseorangan dengan non fasilitas penanaman modal, ternyata membawa perubahan yang tidak sedikit terhadap masyarakat disini.

UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, yang sejak semula mengakui keberadaan hak ulayat namun memberi angin kepada investor untuk dapat dengan mudah memanfaatkan tanah ulayat melalui cara pembebasan tanah yang sekalipun murni disebutkan bersifat keperdataan tetapi mengandung celah untuk dapat "dipublikkan", membuat pelepasan tanah ulayat menjadi

64. Hal ini menunjukkan kepada pengertian simbolis yang maknanya menggambarkan kepada tekad dan upaya pembentuk adat, agar nilai-nilai adat itu tidak tertukar oleh nilai-nilai lain. Istilah lain untuk hal ini digambarkan dengan "*agar cupak indak dituka rang panggaleh, jalan indak dialih urang lalu*" (cupak/sukatan tidak ditukar oleh orang pedagang dan jalan tidak dialih oleh orang yang lalu/lewat).

gampang dilakukan. Peralihan tanah ulayat yang menurut ketentuan hukum adat tidak boleh dilakukan dan telah sejak lama dipatuhi, kecuali dengan persyaratan persyaratan yang amat berat, kini menjadi longgar. Tidak harus muncul fenomena "*mayik tabujua tangah rumah, gadih gadang ndak balaki, rumah gadang katirisan, dan mambangkik batang tarandam* " untuk terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat dan tanpa perlu pula merasa takut terhadap datangnya kutukan atas pelanggaran dari *sumpah pasatiran*.

Bila dahulu larangan ketat terhadap peralihan hak atas tanah ulayat yang tertuang dalam istilah istilah simbolik diatas dimaksudkan untuk menjaga kehidupan anak kemenakan dibelakang hari, agar minimal dapat mempergunakan lahan yang masih dan akan tetap ada dalam genggamannya persekutuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani bila tak ada pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, maka kini pemikiran yang begitu meloncat jauh kedepan dalam ikut merekayasa kehidupan ekonomi anak kemenakan untuk generasi berikut dianggap menjadi tidak penting. Jadi semacam timbul pergeseran nilai nilai adat yang semula sangat *komunal toleran* terhadap corak *ekonomis individualistis*.

Sertifikasi hak atas tanah mulai pula terasa dibutuhkan, guna dijadikan alat mempertahankan hak hak tanah dari kemungkinan gangguan pihak lain yang karakter individualnya makin mengental.

Sebelum pengusaha perkebunan sawit merambah ranah pasaman, kekerabatan masyarakat dalam pola hubungan mamak-kemenakan sebagai ciri paling unik persekutuan matrilineal masih sangat dominan. Terutama mamak dan kepala suku punya peranan ikut menentukan dalam setiap keputusan pemakaian tanah ulayat, sekalipun untuk wewenang demikian tidak lepas dari kontrol kaum perempuan tertua dalam masing masing kaum, paruik dan suku. Sebab itu selaku mamak kepala waris dan penghulu suku harus mengadakan musyawarah lebih dahulu dengan kaum perempuan yang berkepentingan. Para kemenakan pun, lebih lebih kemenakan dibawah daguak menempatkan mamak dalam tingkatan wibawa yang agung, perlu dihormati dan bahkan kalau perlu "dijilati" untuk meraih simpati mamak agar memperoleh pemakaian tanah ulayat yang diinginkan. Sebaliknya mamakpun punya hutang terhadap para kemenakan seperti ditekankan oleh falsafah adat dalam pantun berikut:

Keluk paku kacang belimbing

Tempurung lenggang lenggangkan.

Anak dipangku kemenakan dibimbing

Orang kampung dipertenggangkan.

Kewajiban ekonomi sosial yang terpikul pada pundak seorang mamak, tidak hanya berhenti pada sekadar memikirkan kehidupan dalam keluarga

batihnya, tetapi meluas terutama sampai pada para kemenakan. Bahkan sekaligus orang sekampung.

Seiring dengan penggunaan dan peralihan tanah tanah ulayat di Pasaman, kewajiban, peran dan wibawa mamak termasuk penghulu suku menjadi menciut. Para kemenakan merasa tidak lagi mempunyai kepentingan untuk menggayutkan kehidupan ekonomi kepada mamak, toch tanah ulayat yang diharapkan sudah banyak beralih kepada pengusaha.

Pola hubungan mamak-kemenakan yang semula begitu penting, makin kehilangan gaungnya. Pola hubungan kekerabatan mamak-kemenakan itu semakin tergantikan oleh kecendrungan pola hubungan orangtua-anak, sekalipun untuk kepentingan itu tanah tanah ulayat yang semestinya menjadi warisan kemenakan telah terkorbankan.

Penelitian dilapangan menunjukkan terabaikannya rutinitas kunjungan yang dilakukan kemenakan terhadap mamak, dan sebaliknya tersitanya banyak waktu seorang mamak dalam lingkup keluarga isterinya. Rasa tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakan menjadi sangat luntur dan tererosi oleh nilai nilai kehidupan modern yang semakin individual.

Biaya ganti rugi atau silih jahiah dari pengusaha dalam pembebasan tanah ulayat yang semestinya menjadi hak para saudara perempuan dan anak anaknya sebagai pewaris hak ulayat, ternyata pada umumnya mengalir kedalam keluarga batih sang mamak yang sayangnya banyak digunakan untuk

memenuhi perilaku hidup konsumtif. Akumulasi selanjutnya berakibat kurang dihargainya mamak, sehingga status mamak tidak lagi menjadi lebih terhormat.

Dalam musyawarah untuk pelepasan tanah ulayat, *kaum perempuan dalam kaum, paruik* ataupun *suku* oleh para ninik mamak tidak lagi dimintai pendapat mereka, apalagi untuk diikuti dalam musyawarah. Artinya secara internal, ninik mamak mulai melepaskan kontrol kekuasaan terhadap mereka dari kaum wanita. Dan ini agakny sesuai dengan kemauan pemerintah yang berkuasa saat itu yang bertekad untuk memperkecil timbulnya kendala-kendala penghambat pembangunan. Padahal seperti dikatakan Hamka pada uraian dalam bab terdahulu bahwa yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi harta itu. Dalam hubungannya keluar lingkungan kaum, terutama menyangkut peralihan atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan. Demikian Hamka.

Dalam masyarakat persekutuan matrilineal di lokasi penelitian, sekarang ini fenomena seperti dikatakan Hamka pada uraian diatas hanya menunjukkan kecendrungan berlaku terhadap harta pusaka tinggi kaum. Sebaliknya terhadap hak ulayat, sekalipun itu hak ulayat kaum, wewenang penguasaannya lebih terletak pada tangan mamak tungganai dan penghulu suku. Merekalah jadi penentu kebijakan penggunaan tanah ulayat dan tanpa melalui banyak perundingan yang berbelit serta berkat berkat umpan umpan matang yang dijulurkan pengusaha dan penguasa membuat pelepasan tanah menjadi mudah sehingga secara kuantitas maupun kualitas keadaan hak ulayat semakin menurun.

Sejalan dengan kian rusaknya dan menipisnya hak ulayat yang pada hakikatnya merupakan simbol perekat antara anggota persekutuan matrilineal, maka makin mendangkal pula ikatan dan solidaritas antara sesama warga persekutuan, terutama dalam pola hubungan mamak-kemenakan. Dalam tugas mamak selaku pembimbing kemenakan seperti petuah adat, aspek ekonomi semakin terkesampingkan. Mamak tidak lagi merasa ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan perekonomian keluarga para kemenakannya.

Corak pelapisan sosial pun semakin beragam dan menunjukkan batas yang lebih kentara dibanding situasi sebelum pengusaha perkebunan mengoper alih sebagian hak ulayat di Pasaman. Terjadi kepincangan dalam pemerataan ekonomi. Ada segelintir anggota persekutuan yang semakin

makmur dan lazimnya lapisan ini diisi oleh ninik mamak dan para mediator pada jajaran elite kekuasaan, dan pada lapisan lain yang lebih rendah diisi oleh mayoritas warga dalam suasana hidup yang cukup memprihatinkan. Tak sedikit pula corak kehidupan yang semula sebagai petani pemilik berubah menjadi petani penggarap pada lahan perkebunan sawit.

Dari uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa penggunaan hukum dalam negara modern ternyata membuat nilai nilai luhur tradisional tergantikan oleh corak yang lebih bersifat individual.

Peralihan hak atas tanah ulayat mengakibatkan pula pranata sosial kanagarian menjadi sempit. Wilayah kanagarian dahulu pada umumnya punya ranah yang luas dan mencakup beberapa desa dengan perbatasan nagari yang dapat menembus secara administratif wilayah lain kecamatan sekarang, kini perbatasan tersebut cenderung mengikuti batas administrasi pemerintahan yang ada. Tegasnya, banyak terdapat hak ulayat kanagarian A yang secara administratif berada dalam kecamatan B, terletak pada kecamatan C. Sebagai contoh adalah hak ulayat kanagarian Kinali (dalam Kec. Pasaman) yang digarap oleh PT. AMP dengan luas sekitar 5000 Ha berada dalam kecamatan Palembayan (Kabupaten Agam). Dengan terjadinya peralihan hak ulayat melalui pembebasan tanah atas areal seluas 5000 Ha di kanagarian Kinali tersebut, berakibat kanagarian sebagai kesatuan masyarakat hukum adat punya wilayah yang kian menciut. Hal itu berarti pula pranata pemerintahan menurut

adat lambat laun menjadi mengecil. Sebaliknya pranata ekonomi menjadi berkembang dan interaksi sosial masyarakat dengan lembaga perekonomian menjadi terbiasa. Hal ini terlihat dengan bermunculannya koperasi (KUD dan KJUB) sebagai wadah penampung peserta plasma dan sekaligus sebagai penyalur kebutuhan anggota.

Dari seluruh uraian diatas, dapat kita tengok betapa hukum itu punya kekuatan dalam menggerakkan perubahan perubahan pada masyarakat matrilineal. Hukum digunakan secara sadar untuk menjalankan perubahan.

Kemampuan hukum, khususnya kemampuan UUPA dengan seperangkat peraturan pertanahan dalam hal kaitannya dengan tanah ulayat, lebih khusus lagi kebijakan kebijakan tentang penggunaan/peralihan tanah ulayat melalui pembebasan tanah dalam menggerakkan perubahan tak dapat disangsikan. Kemampuan demikian ini memang menyimpang dari pendapat aliran sejarah yang dipelopori Savigny yang dengan tegas menyangkal kemungkinan penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Konsepsi mereka tentang hukum yang melihatnya sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri, dan norma norma informal (mores) tak dapat digantikan oleh hukum, menyebabkan mereka menepis adanya kekuatan hukum dalam menggerakkan perubahan perubahan. Mores akan selalu mendahului hukum, lantas hukum

yang muncul kemudian itu hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan hidup itu.⁶⁵

UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan tanah ulayat, ternyata disamping berfungsi sebagai *sarana kontrol sosial*, sekaligus juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan "*social engineering*". Pada satu sisi ia menjaga masyarakat tetap berada dalam pola prilaku yang telah mapan, tetapi disisi lain ia mengajak masyarakat untuk mengikuti prilaku baru yang sebelumnya tidak atau belum tumbuh dalam bentuk mores.

Hal yang terakhir ini tampak jelas pada kuantitas dan kualitas peralihan tanah ulayat dalam persekutuan matrilineal di lokasi penelitian. Peralihan tanah ulayat yang sejak dahulu sangat ditabukan bahkan diancam kutukan dari sumpah pasatiran mulai makin diabaikan.

Realitas yang muncul ini lebih mendekati kepada teori rasionalitas Weber dan Talcott Parsons yang melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka melalui proses saling pertukaran dalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya.

Hasil penelitian memperkuat pendapat Satjipto Rahardjo yang mengkategorikan UUPA kedalam penggunaan hukum sebagai sarana social

65. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, hal.112, membahas lebih jauh dan mendalam tentang kemampuan hukum dalam menggerakkan perubahan.

engineering , tak terkecuali dalam masyarakat matrilineal yang dikenal sangat kukuh berpegang kepada adat, karena terbukti terjadinya pergeseran pergeseran dalam struktur masyarakat setempat sehingga memungkinkan terjadinya pula perubahan perubahan proses sosial seperti telah diuraikan dimuka.

Yang agak menarik dari arah perubahan sosial yang timbul itu adalah agak melencengnya realitas yang timbul dari sasaran yang diinginkan oleh undang undang. UUPA secara tegas menetapkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6 UUPA), artinya penggunaan tanah tidak boleh semata mata untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan masyarakat banyak, terutama yang harus diperhatikan adalah kepentingan pihak yang ekonomis lemah (penjelasan umum UUPA bab II angka 4). Jadi ada nilai nilai kebersamaan (komunal) yang harus diemban dalam fungsi sosial dari hak atas tanah. Kenyataan yang timbul memperlihatkan nilai nilai kebersamaan yang diisyaratkan dari fungsi sosial hak atas tanah itu justru berubah arah ke sifat individual yang mementingkan keuntungan pribadi. Nilai nilai luhur tradisional yang sebenarnya lebih komunal sosialistik semakin terlecehkan. Perkembangan menarik ini agaknya dapat dianalisis dari dua sebab :

1. Peraturan-peraturan yang menjabarkan UUPA sebagai peraturan induk banyak yang menyimpang dan tidak konsisten dengan peraturan induknya.

AP. Parlindungan menyatakan:

Banyak undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan dibuat tanpa mengacu kepada UUPA, bahkan saling bertentangan. Tumpang tindih pengelolaan pertanahan serta konsep pembangunan yang meletakkan tanah sebagai aset ekonomi pada gilirannya menyebabkan rakyat tergusur.⁶⁶

2. Pada mula pembentukan UUPA, tampak sekali dikuasai romantisme seperti sikap pada penjajah serta citra dan penghargaan yang diletakkan pada hukum adat. Pemikiran serta siasat ekonomi kurang mendapat perhatian.⁶⁷

Lantas ketika kesadaran ekonomi itu muncul, terutama setelah tanah terlihat sebagai aset ekonomi yang dapat digunakan memancing investor yang mayoritas berasal dari kaum kapitalis, maka ditampunglah kepentingan ekonomi itu pada peraturan-peraturan yang menjabarkan UUPA. Era globalisasi dengan suasana pasar bebas yang kapitalis individualistik, dan ketergantungan Indonesia terhadap negara kaya menyebabkan kebijakan-kebijakan berikut lebih disesuaikan dengan tuntutan yang datang. Tekanan-tekanan eksternal yang datang membuat sasaran perubahan menjadi bergeser dan terdesaklah nilai-nilai tradisional yang ada.

66. AP. Parlindungan, *Kompas*, 24 September 1995, hal.9

67. Lihat selengkapnya pada Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, hal. 181.

Nilai-nilai individual yang kian menonjol dan makin mengikis nilai-nilai komunal sebenarnya terasa kian mencabut warga persekutuan dari akar budayanya semula dan menciptakan kesenjangan-kesenjangan sosial yang lebih kentara. Nilai-nilai tradisional pada suatu tempat yang jika telah teruji mampu menjembatani ketimpangan-ketimpangan sosial sebaiknya dijadikan acuan dalam pembuatan perundang-undangan. Artinya pada suatu ketika hukum tetap dilandaskan kepada mores, yakni mores yang telah terbukti kukuh dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan dan pada saat lain yang diperlukan hukum dibiarkan berjalan di depan, namun untuk yang terakhir ini harus dijaga konsistensi hukum itu dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

4. Analisis terhadap Untung Rugi Akibat Penggunaan Tanah Ulayat

Akibat penggunaan tanah ulayat milik persekutuan matrilineal oleh pengusaha, ternyata tidak mendatangkan keuntungan terhadap warga persekutuan. Jikapun ada hanyalah berupa keuntungan yang tidak langsung dari akibat perkebunan sawit.

Secara ekonomis memang terdapat pembayaran ganti rugi terhadap tanah ulayat selaku siliah jariah dari pengusaha kepada pemilik, namun jumlah ganti rugi yang sekitar Rp 25000-50.000 per Ha itu tersedot kedalam kantong segelintir ninik mamak dan para mediator pada elite kekuasaan. Sementara

mayoritas pemilik seperti rumah tangga para kemenakan tidak mendapat keuntungan apapun.

Berangkat dari teori interaksionisme simbolik, uang silih jahiah itu tak lain dari suatu simbol yang dipakai dalam interaksi sosial pada masyarakat matrilineal sebagai tanda pengakuan hak terhadap pemilik tanah ulayat. *Silih jahiah* diartikan sebagai "pengganti sedikit keringat". Maksudnya pemakai tanah ulayat sudah cukup dengan memberi sedikit uang pengganti kepada pemilik yang selama ini telah berkeringat banyak (bersusah-susah) dalam memelihara hak ulayat, punya kewenangan untuk menggarak tanah ulayat. Dengan silih jahiah yang sedikit itu didalamnya tersirat terjalinnya hubungan kekeluargaan atau kebersamaan antara penggarap dengan pemilik, nilai-nilai kebersamaan mana harus dijaga dengan baik.

Bila dikaji secara ekonomis, uang silih jahiah yang berkisar Rp 25.000 - 50.000 /Ha tanah belumlah nilai yang layak, namun karena uang itu hanyalah merupakan simbol belaka dari terciptanya hubungan kebersamaan maka secara material ia tak dapat dinilai dengan takaran jumlah uang. Dalam menilai nilai kebersamaan itu terkandung nilai-nilai sosial yang harus ditunaikan oleh semua pihak.

Pengusaha harusnya menjaga nilai-nilai kebersamaan itu karena dengan cara seperti itulah ia akan seterusnya dapat diterima dengan aman untuk berusaha dalam ranah persekutuan. Jika dalam sistem pengelolaan perkebunan

itu telah disepakati misalnya 30% dari luas lahan adalah untuk warga pemilik maka itu berarti sebagian nilai-nilai kebersamaan itu telah digariskan, walau banyak nilai-nilai lain yang perlu dihayati.

Semua pengusaha di ranah penelitian ternyata tidak arif dan gagal menterjemahkan makna simbolik. Mereka justru memanfaatkan nilai-nilai tersirat yang tolerantif itu untuk keuntungan diri sendiri sehingga warga persektuan banyak dirugikan.

Sistem kemitraan dalam pengelolaan perkebunan melalui pola bapak angkat-anak angkat dengan lazimnya memberikan luas lahan ulayat sekitar 60%-70% untuk dipakai perusahaan inti, dan sisanya menjadi plasma milik warga selaku anak angkat, ternyata juga tidak menjamin mengalirnya keuntungan ekonomi terhadap warga setempat. Saat penelitian dilakukan, dari seluruh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di lokasi penelitian dan telah berproduksi sejak lama, bahkan ada diantaranya sudah semenjak 7 tahun yang silam, tidak satupun hak plasma rakyat yang telah dibagikan. Sementara keuntungan yang diraih perusahaan apalagi dengan situasi harga minyak sawit yang sangat meningkat diperkirakan semakin tinggi sedang keuntungan yang seharusnya diraih warga tidak jelas ujung pangkalnya. Tiadanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pengelolaan perkebunan sawit pada lahan tanah ulayat menyebabkan hak hak pemilik ulayat semula tidak menjadi perhatian utama.

Hasil musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan (pemilik ulayat dengan pengusaha) sejak semula tidak digariskan secara tuntas dalam perjanjian tertulis, akibatnya rakyat setempat yang awam hukum selalu berada dalam posisi yang lemah. Tidak ditemukan satupun perjanjian tertulis berisi batasan waktu paling lambat penyerahan plasma oleh pengusaha kepada warga, prioritas lahan yang harus lebih dahulu digarap antara inti dengan plasma dan auditor yang dapat dipercaya rakyat terhadap hasil penjualan sawit hasil plasma selama hak warga belum diserahkan. Itu semua merupakan beberapa pokok persoalan penting untuk terjaminnya hak-hak rakyat, namun disepelekan.

Perjanjian tertulis yang ada justru berisi pernyataan pelepasan hak ulayat dari ninik mamak tanpa memperinci imbalan seimbang yang mereka terima. Tiada pengaturan yang balance bagi kepentingan masing-masing pihak. Mediator yang diharapkan menjaga kepentingan rakyat justru berkolusi dengan ninik mamak yang ditempatkan dalam satu wadah *Karapatan Adat Nagari* (KAN) agar mudah dikontrol, dan dengan pengusaha. Tak heran bila dalam dua tahun terakhir ini kesabaran rakyat menjadi menipis dan meledak dalam bentuk penyerangan terhadap perusahaan dan penebangan pohon-pohon sawit. Kasus demi kasus akan muncul susul-menyusul bak gelombang laut, bila kelemahan mekanisme yang ada tak kunjung diperbaiki.

Banyaknya lembaga pemerintah yang mencampuri pengelolaan perkebunan sawit yang terkesan tanpa koordinasi, mulai dari BKPM, Dinas

Perkebunan, Dinas Pertanian, BPN, Pemda Tk.I dan II, Dept. Pertanian dan lainnya, membuat terjadinya saling lempar tanggung jawab terhadap pemulihan hak hak warga pemilik. Sebagai contoh, informasi dari Biro Perekonomian Kantor Gubernur menyebutkan bahwa penyerahan hak baru dilakukan jika hutang anak angkat untuk kepentingan pengelolaan tanaman sawit mulai dari harga bibit, pengurusan dan penyemprotan hama serta pemeliharaan yang berkisar sekitar Rp 8 juta telah terlunasi oleh hasil sawit. Dipihak lain informasi dari Disbun dan BKPMMD menyatakan bahwa penyerahan hak plasma dilakukan setelah 4 tahun sejak ditanam. Manapun yang benar diantara keduanya, warga tetap tak mendapat keuntungan apapun sampai saat penelitian dilakukan, padahal rumusan manapun yang dipakai hutang anak angkat diperkirakan telah lunas cukup dalam 3 tahun petik kurun pertama.

Bilapun dibagikan perkebunan plasma, agaknya yang akan banyak mengeruk keuntungan justru petani berdasi orang luar persekutuan yang datang dari kota, lantaran jatah plasma yang diberikan banyak dijual oleh ninik mamak kepada pembeli yang diaku sebagai kemenakan serta para mediator yang dengan berbagai cara menancapkan kukunya pada tanah ulayat.

Terjadinya pelanggaran lahan garapan oleh oleh pengusaha melebihi batas yang diizinkan karena mencakup areal sangat luas yang sulit untuk dipantau, dan tak jarang mencaplok lahan garapan penduduk, mendatangkan kerugian tidak sedikit pula terhadap warga.

Tiadanya ketentuan yang melarang penggarapan lahan sebelum turunnya HGU, membuat pengusaha berpacu untuk segera melakukan aktifitas penggarapan berdasarkan izin lokasi dan pernyataan pelepasan hak dengan menunda pengajuan HGU, untuk strategi mana diperoleh dalih untuk memanipulasi umur sawit yang sesungguhnya dengan hitungan penggarapan dimulai sejak turunnya HGU. Akibatnya secara *de jure* penundaan penyerahan plasma seolah olah menjadi sah saja untuk dilakukan dengan bertolak dari bukti perolehan HGU, padahal secara *de facto*, perkebunan telah berproduksi sejak lama.

Keuntungan yang baru dapat direguk oleh warga persekutuan hanyalah keuntungan sebagai akibat tidak langsung dari penanaman perkebunan sawit berupa terbukanya arus transportasi dari dan ke wilayah mereka yang jauh lebih baik dari keadaan semula. Hasil perkebunan sawit yang dikelola oleh perseorangan, sekalipun dalam jumlah sangat terbatas, dapat ditampung oleh investor yang memiliki industri pengolahan minyak sawit. Disamping itu terserapnya sejumlah sekitar 2000 orang tenaga kerja buruh tani kedalam usaha perkebunan. Keuntungan yang telah banyak dinikmati warga justru berasal dari perkebunan sawit perintis yang dikelola pemerintah melalui PT. Perkebunan VI, bukan dari pihak pengusaha yang beroperasi kemudian. Dewasa ini bahkan mendatangkan keuntungan sekitar Rp 1,5 juta perkapling/bulan, padahal ditanam diatas tanah peninggalan *erpacht* Belanda.

Sistem perkebunan inti rakyat (inti-plasma) yang masing masing seolah olah berdiri sendiri, hemat penulis membawa kelemahan kelemahan tertentu, antara lain pengusaha yang lebih kuat dapat dengan sesukanya mengolah inti lebih dahulu dan meletakkannya pada lahan yang subur, sedangkan areal untuk plasma digarap paling ujung dengan meletakkannya di lahan yang asal jadi. Cara ini dapat mengundang kecemburuan pemilik plasma dan ketidak puasan mana dapat ditumpahkan melalui pembakaran dan penebangan batang batang pohon sawit. Gejala sosial yang tidak sekali dua terjadi seperti ini timbul akibat adanya dua macam kepemilikan yang berbeda, namun dijalankan oleh satu tangan. Agaknya solusi terbaik adalah dengan melebur perkebunan plasma dan inti kedalam milik bersama dan sebagai gantinya pengusaha memberikan saham perusahaan kepada warga. Artinya warga setempat dilibatkan sebagai pemilik perusahaan melalui penggantian areal plasma kedalam saham dan memperoleh keuntungan dari laba produksi. Wakil yang dipercaya oleh pemegang saham dari warga persekutuan harus pula ditempatkan dalam kepengurusan dan direksi. Dengan demikian perusahaan dapat lebih memfokuskan perhatiannya kepada pertumbuhan produksi tanpa terganggu oleh gejala gejala sosial yang dipicu warga.

Dari aspek sosial budaya, melunturnya pola hubungan manak-kemenakan dalam kekerabatan matrilineal sebagai suatu hal yang merugikan, ternyata dapat memicu lebih eratnya hubungan orangtua-anak, dan selanjutnya membuat

orangtua lebih bertanggung jawab terhadap masa depan anak anak mereka tanpa harus mengandalkan peranan mamak. Begitu pula dengan kerugian lain berupa makin pudarnya nilai nilai kebersamaan (komunal), tampaknya memicu pula sikap kemandirian yang lebih siap menantang arus globalisasi dan persaingan.

Terdapat memang plus minus dampak penggunaan tanah tanah ulayat oleh pengusaha perkebunan di Pasaman, sehingga cukup sulit ditentukan mana diantara kedua dampak itu yang lebih dirasakan. Namun untuk sementara ini penulis berkecendrungan bahwa dampak negatiflah yang lebih mengemuka. Kekuasaan mamak terhadap tanah tanah ulayat yang mulai mencoba melepaskan diri dari kontrol kaum perempuan ternyata mempermudah timbulnya kolusi dan penyalahgunaan kewenangan lainnya. Selanjutnya keuntungan ekonomi yang tidak merata dan dinikmati segelintir orang, menyebabkan munculnya garis garis pelapisan sosial yang makin mencolok, hal mana tidak dijumpai sebelumnya dan juga tidak pada ranah matrilineal lainnya yang tidak terusik pengusaha perkebunan.

Banyaknya pendatang dari luar, terutama dari Sumatera dan Jawa yang mencoba peruntungan di wilayah yang jadi primadona perkebunan ini setidaknya untuk wilayah Sumatera Barat, memang membuat denyut nadi wilayah ini semakin hidup dan kian kayanya budaya setempat, tapi tak pelak juga mengundang kerawanan dan konflik konflik yang terkadang berbau sara.

Memang seperti dikatakan Merton, suatu pranata sosial dapat menjadi fungsional terhadap suatu unit sosial tertentu, seperti akibat-akibat positif yang diterima lembaga pemerintahan dan pengusaha, namun dapat menjadi disfungsi bagi unit sosial persekutuan matrilineal, antara lain bergesernya struktur kekerabatan masyarakat dalam pola hubungan mamak-kemenakan yang semula terasa kental kian menjadi menipis. Akibatnya seorang anak kemenakan di Minang Kabau yang semula punya dua sandaran ekonomi yang kukuh yakni dari orang tua dengan modal pusaka rendah dan dari mamak dengan modal pusaka tinggi berupa tanah ulayat kini justru kehilangan satu sandaran dari mamak lantaran semakin menipisnya hak ulayat.

Belajar dari beberapa dampak yang merugikan di atas, kiranya sudah saatnya untuk dipikirkan memberikan kucuran kredit langsung kepada warga dengan lebih dulu menghimpun mereka dalam suatu wadah perekonomian seperti koperasi, dengan agunan lahan perkebunan itu sendiri. Keaktifan pemerintah selaku pengawasa, pembimbing maupun fasilitator sangat diperlukan. Banyak sarjana pertanian yang dewasa ini menganggur dapat diberdayagunakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan pengembangan dan produktivitas perkebunan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kabupaten Pasaman di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 10 wilayah kecamatan dengan dua diantaranya yakni Kecamatan Pasaman dan Kinali dengan luas wilayah 127.210 Km², merupakan tempat yang sangat cocok untuk usaha perkebunan sawit. Selain usaha perkebunan yang dikelola PTP VI diatas tanah bekas hak erpacht, kini terdapat 8 perusahaan (5 PMDN dan 3 PMA) yang beroperasi diwilayah ini dengan rencana luas lahan seluruhnya mencapai 59.850 Ha dan 80% diantara luas tersebut berasal dari tanah tanah ulayat.
2. Ada dua faktor penyebab yang mendorong warga persekutuan setempat melepaskan tanah ulayat mereka untuk kepentingan pengusaha, yakni :
 - a. Faktor internal, meliputi :
 - Alasan ekonomis.
 - Alasan alasan yang bersifat religius.
 - Penafsiran terhadap pelepasan hak yang dianggap tidak memeralihkan hak milik.
 - b. Faktor eksternal, meliputi :
 - Tekanan dari pemegang kekuasaan.
 - Trauma psikhis oleh luka sejarah.

3. Pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan usaha perkebunan diatas menempuh dua pola :

a. Mengikuti ketentuan hukum agraria nasional

Pelepasan tanah dalam pola ini lebih tertuju pada ulayat suku serta ulayat nagari dan dilakukan melalui pembebasan hak atas tanah, dengan mengikuti prosedur berikut :

1. Pengajuan izin lokasi oleh pengusaha kepada BPN.
2. Pengurusan bukti-bukti pelepasan hak.
3. Pengajuan permohonan HGU.

b. Mengikuti ketentuan hukum adat

Pola kedua ini lebih banyak dilakukan untuk pelepasan hak ulayat kaum dengan cara jual beli adat yang dilakukan secara *tunai dan terang* (*basuluah matohari, bagalanggan mato rang banyak* = bersuluh matahari, bergelanggan mata orang banyak). Lazimnya dengan dibuat perjanjian tertulis diatas kertas segel, ditanda tangani kedua pihak dan saksi yang umumnya dari batas sepadan dan pucuk nagari

4. Pengaruh hukum khususnya tentang kebijakan untuk penggunaan tanah ulayat oleh investor, ternyata membawa perubahan sosial yang tidak kecil kedalam masyarakat matrilineal. Ia menyentuh sisi yang paling unik dalam struktur kekerabatan ditandai dengan makin bergesernya pola hubungan mamak - kemenakan kepada pola hubungan orang tua - anak. Kontrol terhadap kekuasaan mamak oleh kaum wanita dalam masing-masing kaum semakin

terlepas, sehingga hak ulayat semakin menipis karena mudah diperalihkan ninik mamak tanpa alasan yang patut menurut adat dan tanpa perlu takut terhadap kutukan atas pelanggaran sumpah pasatiran. Akibatnya volume interaksi sosial dengan mamak menjadi berkurang.

Mamak tidak lagi diletakan dalam lapisan sosial yang lebih terhormat, dan tempat pengaduan nasib, sebaliknya tanggung jawab sosial ekonomi mamak terhadap rumah tangga kementerian semakin dangkal. Biasanya ganti rugi atas tanah ulayat yang bermuara kedalam keluarga batih mamak dan kantong mediator dari elit kekuasaan menciptakan batas pelapisan sosial yang lebih kongkrit.

Dengan demikian terjadi pergeseran nilai-nilai sosial, dimana nilai-nilai luhur tradisional yang bercorak komunal toleranatif tergantikan oleh nilai-nilai yang cenderung ekonomis individualistik

5. Disamping keuntungan-keuntungan yang diperoleh warga persekutuan matrilineal sebagai akibat dari penggunaan tanah ulayat mereka oleh pengusaha antara lain berupa ; kian terbukanya jalur transportasi, tertampung nya sejumlah warga untuk bekerja diperkebunan sawit, makin terkonsentrasinya pikiran seorang bapak terhadap keluarga batihnya dan terpicunya semangat kemandirian warga, terdapat pula banyak kerugian yang diderita, antara lain ; tidak pulihnya hak-hak warga atas hasil produksi kebun plasma mereka, ganti rugi yang tidak seimbang dalam pembebasan tanah, mekanisme yang tidak jelas dan kurang transparan dalam pengelolaan

perkebunan sawit membuat mudah terjadinya kolusi antara ninik mamak, mediator dan pengusaha, luntur^{wf} nilai-nilai luhur tradisional yang bersifat komunal, timbul pelapisan sosial yang kian kentara dan banyaknya petani yang kehilangan lahan garapan.

B. Saran-saran

Terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat pendaya gunaan hak ulayat oleh pengusaha supaya kelak menguntungkan semua pihak, penulis menawarkan saran-saran berikut :

1. Pembagian perkebunan inti dan plasma melalui pola kemitraan yang dikelola oleh satu tangan karena mengandung banyak kelemahan, maka sebaiknya dihapuskan, sedangkan kepada mereka yang sedianya menjadi pemegang kebun plasma dilibatkan menjadi pemegang saham perusahaan. Wakil yang dipercaya oleh pemegang saham dari golongan ini harus pula diberi kesempatan duduk dalam kepengurusan dan dewan direksi.

Dengan dilibatkannya warga persekutuan kedalam perusahaan diperkirakan dapat memperkecil penyimpangan-penyimpangan, yang bila tidak dilakukan dapat menyulut gejolak sosial yang merugikan tidak saja investor juga warga setempat.

2. Banyaknya lembaga pemerintah yang dilibatkan dalam pengurusan usaha perkebunan justru terkesan tidak efektif dan terjadi saling lempar tanggung jawab, maka perlu penyederhanaan serta membentuk lembaga khusus yang

bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas pulihnya hak-hak warga setempat. Lembaga khusus ini diisi oleh kekuatan-kekuatan formal dan informal seperti orang-orang dari *Tigo tungku sajarangan*.

3. Hasil musyawarah untuk pelepasan tanah harus dibuat secara tertulis yang secara rinci juga memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hak-hak warga, seperti ; waktu tanam dan waktu penyerahan, hak pemilihan lahan dan perlindungan terhadap harga jual. Para pengusaha hendaknya juga lebih arif dalam membaca makna simbolik dalam berinteraksi dengan warga persekutuan matrilineal.
4. Sebaiknya pemerintah melarang dimulainya penggarapan lahan selama HGU belum diturunkan, sebab usia tanam dapat direkayasa dihitung sejak lahirnya HGU yang sengaja diurus lambat, walau fakta menunjukkan bahwa sawit telah berproduksi saat HGU lahir.
5. Sudah saatnya untuk dipikirkan pemberian kredit langsung kepada warga untuk dimanfaatkan membuka lahan perkebunan sawit dengan lebih dulu menghimpun mereka dalam wadah koperasi dengan agunan lahan perkebunan itu sendiri. Pemerintah yang berdiri selaku fasilitator, pengawas dan pembimbing dapat pula mengaktifkan sarjana-sarjana pertanian yang dewasa ini banyak menganggur. Imbalan untuk para sarjana yang sebenarnya sangat potensial itu untuk jangka panjang dapat diberikan sekapling lahan sawit.

C. Kontribusi Teori.

Dari hasil temuan penelitian dan kesimpulan dirumuskan beberapa konsep teori sebagai berikut:

1. Perubahan dalam tata nilai di masyarakat merupakan fungsi dari sistem produksi.
2. Kemajuan dalam industrialisasi berbanding terbalik dengan tatanan nilai nilai tradisional.
3. Ketimpangan sosial ekonomi berkorelasi dengan ditinggalkannya aspek mores pada produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 1997 : *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad, Anis. 1997 : *Menelusuri Sikap Jiwa Manusia Minang*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Ahmadi, Abu. 1988 : *Ilmu Sosial Dasar*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, Chidir. 1991 : *Badan Hukum*, Alumni Bandung.
- Alma, Buchari. 1994 : *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Amir B. 1980 : *Minangkabau, Manusia dan Kebudayaan*, FKPS IKIP, Padang.
- Amran, Rusli. 1981 : *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- 1995 : *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Anwar, Chairul. 1997 : *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ardiwilaga, Rustandi. R. 1962 : *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek, Masa baru*, Bandung.
- Ashshiddiqy, Hashbi, et al. 1974 : *Alquran dan Terjemahnya*, Intermasa, Jakarta.
- Bahri, Samsul. 1980 : *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini*, FHUK Unand, Padang.
- Barus Badrulzaman, Mariam. 1994 : *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Berry, David. 1983 : *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, disunting oleh Paulus Wirutomo, Rajawali Pers, Jakarta.

- Blau, Peter . M. Meyer, Marshal. W. 1987 : *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta.
- BPHN. 1978 : *Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung.
- Chairuddin, OK. 1991 : *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daud Ali, Moh. 1991 : *Azas Azas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Effendi, Bachtiar. 1993 : *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni Bandung.
- Faisal, Sanapiah. 1990 : *Penelitian Kualitatif*, Asah Asih Asuh, Surakarta.
- Gautama, Sudargo. 1973 : *Tafsiran UUPA*, Alumni, Bandung.
- 1995 : *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas*, Citra Aditva Bhakti.
- Hakimy Idrus. Dt. Rajo Penghulu. 1997 : *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Hamka. 1963 : *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad. 1970 : *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 1974 : *UUPA, Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaannya, I dan II*, Jembatan, Jakarta,
- 1994 : *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Jembatan, Jakarta.
- Haritijo Soemitro, Roni. 1984 : *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Hartomo. H. 1990 : *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hatta. M. 1995 : *Pengantar Kejalan Ekonomi Sosiologi*, Inti Indayu Press, Jakarta.
- Janim, Jamilus. 1991 : *Alur Panitahan Adat Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

- Johan Nasution, Bahder dan Warijati, Sri. 1998 : *Bahasa Indonesia Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kadir Muhammad, Abdul. 1989 : *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kusumah, Muljono. W. 1986 : *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Kwik Gian Gie. 1995 : *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lerner, Daniel. 1978 : *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Magnis Suseno, Frans. 1995 : *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahendra, Oka. AA. 1996 : *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Moleong, Lexy. J. 1989 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Muhammad, Bushar. 1994 : *Azas-azas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muis, Abdul. 1990 : *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Mujiono. 1992 : *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustafa, Bachsan. 1998 : *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung.
- Nagazumi, Akira. 1986 : *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial Ekonomi Pada Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nasution. S. 1996 : *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

- Nazir. M. 1985 : *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Padgorecki, Adam dan Whelan, Christoher. J. 1987 : *Sociological Approaches To Law*, terjemahan Rnc. Widyaningsih dan G. Karta Saputra, Bina Aksara Jakarta.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy. 1982 : *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Parlindungan. AP. 1990 : *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 1990 : *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 1991 : *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 1992 : *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 1993 : *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah. Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin angin, Effendi. 1991 : *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prajogo Surjohadibroto, Imam. 1995 : *Surat-surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Joko. 1987 : *Dasar Hukum Persetujuan Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purvosutjipto. 1978 : *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Jambatan, Jakarta, 1987.
- Puspito, Hendro. Oc. 1994 : *Sosiologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman. 1985 : *Indonesiasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____ 1995 : *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Candra Pratama, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto. 1983 : *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- _____ 1986 : *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____ 1991 : *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rasyidi, Lily dan Wyasa Putra. IB. 1993 : *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Redjeki Hartono, Sri. 1995 : *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Undip, Semarang.
- Rifai, Moh. H. 1978 : *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang.
- Ritzer, George. 1992 : *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusli, Hardiyan. 1996 : *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Saleh, Wantjik. 1977 : *Hak-hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salindeho, John. 1993 : *Masalah tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ 1994 : *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanggono Dirajo. Dt. 1987 : *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Saputra, Karta. G. 1986 : *Masalah-masalah Pertanahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____ 1991 : *Hukum Tanah jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendaftar Gunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satrio. 1993 : *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Siregar, Bismar. 1992 : *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta.

- Soehadi. R. 1990 : *Tanya Jawab Hukum Agraria*, Karya Anda, Surabaya.
- Soekanto. 1996 : *Meninjau Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982 : *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 1985 : *Perspektif Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 1986 : *Fungsionalisme Imperatif, Seni Pengenalan Terhadap Talcott Parsons*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 1987 : *Masyarakat dan Kekuasaan*, Rajawali, Jakarta.
- 1987 : *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- 1993 : *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetiknjo, Iman. 1994 : *Politik Hukum Agraria Nasional*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Soetomo. 1984 : *Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Subekti. 1995 : *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudiyat, Iman. 1982 : *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudrajat, Ajat. 1994 : *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat Relevansi dengan Islam Indonesia*, Bumi Aksara Jakarta.
- Suhendar, Endang. 1996 : *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, Elsam, Jakarta.
- Sujanto, Agus, et al. 1986 : *Psikologi Kepribadian*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sujanto, Bagong, et al. 1994 : *Gejolak Arus Bawah*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Sumantoro. 1986 : *Hukum Ekonomi*, UI Pres, Jakarta.
- 1988 : *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 1996 : *Pengertian Pokok-pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996 : *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Parawira, Jakarta.
- Sunayadi. 1978 : *Beberapa Pemikiran Kearsah Pembarua Hukum Tanah*, Alumni Bandung
- Sutopo. HB. 1988 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Syarifuddin, Amir. 1984 : *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tandiko, R. St. 1994 . *Sumarak Nagari*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Thalib, Sajuti. 1985 : *Receptio a Contrario*, Bina Aksara, Jakarta.
- Toeah. H. Dt. 1976 : *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Tumanggung. ID. Dt. 1998 : *Gurindam Adat minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Wahjono, Padmo. 1989 : *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind.Hill Co. Jakarta.
- Wayan Suandra. I. 1991 : *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibawa, Samodra. et al. 1994 : *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1995 : *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardi. 1977 : *Aspek-aspek Perbankan*, Tarsito. Bandung.

Yakub. Nurdin. B. Dt. 1989 : *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau*
Buku kesatu, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

_____ 1990 : *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau*
Buku kedua, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

_____ 1991 : *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau*
Buku ketiga, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

_____ 1995 : *Hukum Kekerabatan Minangkabau I*, Pustaka
Indonesia, Bukittinggi.

_____ 1995 : *Hukum Kekerabatan Minangkabau II*, Pustaka
Indonesia, Bukittinggi.

KOMPAS, 24 September 1995, Gramedia, Jakarta.